

**SANKSI PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK  
YANG MELAKUKAN PEMBELAAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sungguminasa)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum Islam  
Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

Oleh

**E R N I**

NIM. 10300108020

**JURUSAN HUKUM PIDANA DAN KETATANEGARAAN  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2012**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : E R N I

NIM : 10300108020

Tempat/Tanggal Lahir : Sungguminasa, 01 Januari 1990

Fakultas/Jurusan : Syariah & Hukum/Hukum Pidana & Ketatanegaraan

Alamat : Jln. Nuri No.14B Sungguminasa

Judul Skripsi : Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik yang Melakukan  
Pembelaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di  
Pengadilan Negeri Sungguminasa)

Menyatakan dengan semangatnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 11 Juli 2012

Penyusun,

**E R N I**

NIM: 10300108020

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara **ERNI**, NIM: 10300108020, mahasiswa jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik yang Melakukan Pembelaan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sungguminasa)," memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata-Gowa, 23 Juli 2012

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag  
NIP.19561231 198703 1 022

Dra. Nila Sastrawati, M.Si  
NIP. 19710712 199703 2 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik yang Melakukan Pembelaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sungguminasa),” yang disusun oleh **Erni**, NIM: 10300108020, mahasiswa jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2012 M, bertepatan dengan 14 Syawal 1433 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 06 September 2012 M

21 Syawal 1433 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Ali parman, MA	(	)
Sekretaris	: Dra. Sohrah, M.Ag.	(	)
Munaqisy I	: Drs. Hamzah Hasan, M.Hi.	(	)
Munaqisy II	: Dr. Hamsir, SH., M.Hum.	(	)
Pembimbing I	: Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag.	(	)
Pembimbing II	: Dra. Nila Sastrawati, M.Si.	(	)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah &  
Hukum UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Ali Parman, MA

Nip: 19570414 198603 1 003

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah swt., yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga proses penulisan skripsi yang berjudul “Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik yang Melakukan Pembelaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sungguminasa),” ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai waktu yang direncanakan, walaupun dalam pembahasan dan uraiannya masih sederhana.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw., Nabi yang telah diutus untuk membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam dan sebagai penerang jalan manusia dari alam jahiliyah menuju ke alam yang diterangi oleh ilmu pengetahuan.

Tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun material, penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah di sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Muh. Arsyad dan Ibunda Rohani yang mendidikku, menyekolahkanku hingga pendidikan tinggi, serta doa dan dukungan yang tiada henti dalam menyertai langkah dalam menapaki jenjang pendidikan hingga bisa menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT., M.S. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan seluruh pembantu dekan dan Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.A. mantan Dekan Fakultas Syariah & Hukum.
4. Drs. Hamsah Hazan, M.Hi. selaku Ketua Jurusan dan Dra. Nila Sastrawati, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana & Ketatanegaraan yang telah memberikan bimbingan, nasehat, petunjuk, dan saran, sehingga penulisan skripsi ini dapat saya selesaikan.
5. Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Ibu Ennid Hasanuddin, SH., CN., MH., Ibu Hernawati, SH., dan Bapak Yoga Ariastomo Nugroho, SH., MH., yang telah mengizinkan dan bersedia menjadi informan,
6. Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag. selaku dosen pembimbing pertama dan Dra. Nila Sastrawati, M.Si. selaku dosen pembimbing kedua yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan bantuan, arahan, dan nasehatnya menjadi lebih mengerti.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah banyak berjasa dalam membina dan memberikan bekal berupa kuliah tentang hukum dan hukum Islam, sehingga memudahkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kakakku Subuhan dan Nurhayana serta adikku Sudarni dan Keponakanku Darpin Apandi, yang telah membantu dan member dukungan untuk dapat segera menyelesaikan dan mendapat hasil yang terbaik dan selalu membantu dikala letih.
9. Saudara-saudara yang kehadirannya memberikan kesejukan dan senyumannya yang membuahkan optimisme pada penulis untuk terus maju menapaki jalan-jalan semangat dalam hidup ini.

10. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Pidana & Ketatanegaraan angkatan 2008 yang selalu berjuang bersama dalam suka dan duka. Tak terkecuali semua rekan-rekan mahasiswa khususnya Fakultas Syariah dan Hukum serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang banyak memberikan bantuannya, baik moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.

Sebagai manusia biasa yang mempunyai keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Dengan segala kerendahan hati penulis berharap agar pembaca memberikan kritik dan saran yang membangun bagi kemajuan pengetahuan penulis karena penulis sadar bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan.

Besar harapan penulis, semoga tulisan ini dapat berguna dalam memperluas wawasan dan menambah pengetahuan bagi semua pihak.

Penulis

ERNI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
JUDUL .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
ABSTRAK .....	xiii
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian .....	8
D. Kajian Pustaka .....	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
F. Garis Besar Isi Skripsi .....	12
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik .....	14
B. Penerapan Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik yang Melakukan Pembelaan .....	42
C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik yang Melakukan Pembelaan ...	47



### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

A. Lokasi Penelitian .....	58
B. Jenis Penelitian .....	58
C. Pendekatan yang Digunakan .....	59
D. Pengumpulan Data .....	59
E. Pengolahan dan Analisis Data .....	64

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	67
B. Jenis-Jenis Sanksi Pidana yang Di Jatuhkan Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik yang Melakukan Pembelaan .....	74
C. Dasar Pertimbangan dan Upaya Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik yang Melakukan Pembelaan .....	77
D. Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik yang Melakukan Pembelaan .....	80
E. Hukum Islam Memandang Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik yang Melakukan Pembelaan .....	82

### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	89
-----------------------------	----

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar nama ketua pengadilan sejak 1964 sampai sekarang . . . . .	68
2 Batas-batas wilayah secara khusus . . . . .	71
3 Perkara pidana pencemaran nama baik beserta putusannya pada tahun 2009 . . . . .	72
4 Perkara pidana pencemaran nama baik beserta putusannya pada tahun 2011 . . . . .	73



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Sa	S	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Za	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	s (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	d (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	-	-
ي	Ya'	Y	Apostrof

## **ABSTRAK**

**NAMA : ERNI**

**NIM : 10300108020**

**JURUSAN : HUKUM PIDANA DAN KETATANEGARAAN**

**JUDUL : SANKSI PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG  
MELAKUKAN PEMBELAAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sungguminasa)**

---

Tindak pidana pencemaran nama baik dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan tertentu dengan tujuan nyata untuk menyiarkan tuduhan itu kepada khalayak ramai. Delik penghinaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditujukan untuk perbuatan yang dilakukan untuk semua orang. Sanksi pidana pencemaran nama baik yang melakukan pembelaan diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pokok permasalahan yang diteliti adalah penerapan sanksi pidana pencemaran nama baik yang melakukan pembelaan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pencemaran nama baik yang melakukan pembelaan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis metode pengambilan data, yaitu metode studi lapangan dan studi kepustakaan. Dengan metode studi lapangan, penulis langsung ke Pengadilan Negeri Sungguminasa Kabupaten Gowa untuk mencari data yang diperlukan terkait dengan pembahasan skripsi ini dengan menggunakan metode wawancara. Penulis melakukan wawancara langsung kepada hakim yang menangani perkara pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Dengan metode kepustakaan dilakukan pengumpulan data sebanyak mungkin yang berasal dari referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan, yaitu meliputi buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya yang dipandang ada kaitannya dengan obyek penelitian yang dijadikan pembahasan.

Hasil penelitian diperoleh tentang sanksi pidana pencemaran nama baik yang melakukan pembelaan, harus berdasarkan pertimbangan hakim. Hakim yang menentukan apakah hal tersebut merupakan pencemaran nama baik yang dilakukan merupakan kepentingan umum atau untuk membela diri, apalagi saat ini ada undang-undang yang mengatur tentang kebebasan berpendapat di muka umum.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka disarankan agar hakim harus lebih teliti dalam menyikapi kasus pencemaran nama baik dan harus lebih selektif dalam memutuskan perkara pencemaran nama baik, apalagi dengan adanya undang-undang kebebasan berpendapat di muka umum.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam hidup ini, setiap manusia menghendaki martabat, kehormatannya terjaga, seperti halnya jiwa, kehormatan, dan nama baik seperti manusia juga harus dilindungi, bebas dari tindakan pencemaran terhadapnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 dan Pasal 311 secara terang mengancam dengan pidana penjara dan denda bagi seseorang yang dengan sengaja menuduh orang lain melakukan sesuatu hal. Namun, upaya terhadap perlindungan terhadap martabat manusia tersebut ternyata belum dapat terealisasi secara berarti.

Dalam hukum Islam sebagai *rahmatan lil alamin*, pada prinsipnya telah menjaga dan menjamin akan kehormatan setiap manusia juga mengharuskan untuk menjaga kehormatan saudara-saudaranya, seperti memberi sanksi kepada seseorang yang menuduh orang lain melakukan zina tanpa dapat menunjukkan bukti yang ditentukan dalam hukum Islam. Sebagaimana firman Allah swt. QS al-Nur (24): 4, yang berbunyi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

1

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik<sup>1</sup> (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.<sup>2</sup>

Ayat di atas menerangkan ketentuan hukuman delapan puluh kali dera bagi orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik yang suci dan muslimah dengan tuduhan berbuat zina tanpa sanggup mendatangkan empat orang saksi yang membenarkan tuduhannya itu. Selain hukuman dera delapan puluh kali dera itu penuduh tidak akan diterima kesaksiannya untuk selama-lamanya kecuali bertobat dan memperbaiki dirinya, maka Allah swt. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaitannya dengan tindak pidana pencemaran nama baik adalah sama-sama menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud supaya orang yang dituduh itu tercemar nama baiknya.

Kenyataan ini masih banyak kasus-kasus dan pengaduan terkait tindak pidana pencemaran terhadap nama baik dan kehormatan yang disertai bukti-bukti yang menunjukkan akan tindak kejahatan ini. Di antara bentuk tindakan pencemaran nama baik adalah menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud supaya orang yang dituduh itu tercemar nama baiknya.

---

<sup>1</sup> Yang dimaksud wanita-wanita yang baik-baik di sini ialah wanita-wanita yang suci, akil balig dan muslimah.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya* (Jakarta: t.p., 1984), h. 543-544.

Kasus-kasus pencemaran nama baik telah menyita perhatian masyarakat luas. Rasa keadilan masyarakat terusik sehingga masyarakat pun bereaksi. Pasal-pasal tentang pencemaran nama baik sering dianggap disalah gunakan untuk menutupi suatu kejahatan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui, khususnya bagi masyarakat awan, berkaitan dengan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik sebenarnya memiliki nilai positif yang mengakar pada budaya Indonesia. Masyarakat Indonesia yang menganut budaya timur dikenal sebagai masyarakat yang sopan dan ramah demi menjaga kerukunan.

Seseorang yang menyampaikan pendapat atau kritikan secara lisan atau tertulis tidak dapat begitu saja dijerat dengan pencemaran nama baik dan dijatuhi pidana karena perbuatannya. Hal tersebut disebabkan karena penyampaian pendapat atau kritikan tersebut bisa saja merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya saja Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa “tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, bila perbuatan itu jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”<sup>3</sup> Dengan demikian, perbuatan pencemaran nama baik secara lisan maupun tidak tertulis tidak dapat dipidana, apabila perbuatan tersebut dilakukan demi membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri.

---

<sup>3</sup> Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHPA, & KUHPdt)* (Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2008), h. 77.



Menurut pengertian umum pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.<sup>4</sup> Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk “pembunuhan karakter” yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan masalah dalam masyarakat umum, maka hukum pidana mengkomodasinya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Fitnah yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan yang diucapkan disebut *slander*. Fitnah lazimnya merupakan kasus delik aduan, maksudnya seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan negeri, dan jika menang bisa mendapatkan ganti rugi. Pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik.

Tindak penghinaan ini hanya dapat dituntut atas pengaduan orang yang dihina, merupakan pembatas konkret dari penuntutan tetapi justru rasa subjektif dari korban inilah yang mungkin menimbulkan keragu-raguan bagi pengecut, penuntut, atau pemutus perkara, apakah benar ada penghinaan atau tidak.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), h. 330.

<sup>5</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Cet. III; Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h. 102-103.



Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ketentuan pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan:

Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).<sup>6</sup>

Berdasarkan pasal di atas, penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu, dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya. Perbuatan tersebut cukup perbuatan biasa, yang sudah tentu merupakan perbuatan yang memalukan, misalnya menuduh bahwa seorang telah berselingkuh. Dalam hal ini bukan perbuatan yang boleh dihukum, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila di umumkan. Tuduhan tersebut harus dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka penghinaan itu dinamakan menista atau menghina dengan surat (secara tertulis), dan dapat dikenakan Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penghinaan menurut Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas dapat dikecualikan (tidak dapat dihukum) apabila tuduhan atau

---

<sup>6</sup> Solahuddin, *op.cit.*, h. 76-77.

penghinaan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa membela diri. Patut atau tidak pembelaan kepentingan umum dan pembelaan diri yang diajukan oleh tersangka terletak pada pertimbangan hakim.

Hakim wajib memeriksa apakah seseorang bertindak untuk kepentingan atau karena terpaksa untuk membela diri. Jika dia diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhannya dan tidak dapat, dan tuduhan bertentangan dengan yang di ketahui maka akan menjadi delik fitnah (Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dipidana sangat berat, yaitu maksimum empat tahun penjara.<sup>7</sup> Di samping itu, menurut ayat (2), dapat dicabut hak-hak yang dimuat dalam Pasal 35 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Menurut Pasal 313, membuktikan kebenaran tuduhan ini juga tidak diperbolehkan apabila kepada korban dituduhkan suatu tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, dan pengaduan ini *in concreto* tidak ada.<sup>8</sup>

Menurut Edly Os Hiarej, berpendapat tindakan pencemaran nama baik dianggap tidak sesuai dengan tradisi Indonesia yang menjunjung tinggi adat dan budaya ketimuran.<sup>9</sup> Sehingga, pencemaran nama baik dianggap sebagai

---

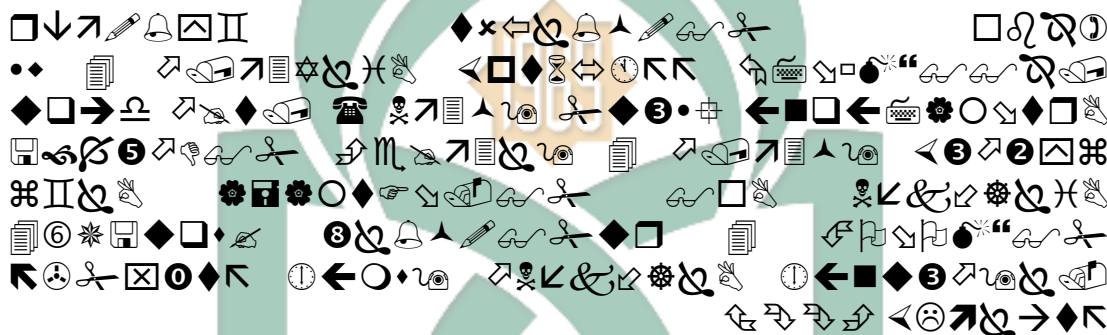
<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP* (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 179.

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, h. 101.

<sup>9</sup> Edly OS Hiarej, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus* (Jakarta: Pena, 2002), h. 13.

*rechtsdeliction* (pelanggaran hukum) dan bukan *wetdelicten* (pelanggaran undang-undang).<sup>10</sup>

Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik dan sanksinya dalam pandangan Islam di *qiyaskan* dengan kejahatan berbagai macam tindak pidana, bisa dihukum dengan hukuman *qadzaf* (menuduh berzina) dan berita bohong. Sesuai dengan QS al-Nur (24): 11



Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.<sup>11</sup>

Dengan demikian kepastian hukum dalam hukum Islam terhadap perilaku tindak pidana pencemaran nama baik dikenakan hukuman penjara seumur hidup atau

<sup>10</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 2004), h. 32.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 544-545.

hukuman mati dan sanksi moral yaitu tidak di terima kesaksiannya seumur hidup serta tetap dengan mengedepankan asas-asas hukum dan keadilan yang beradab.

Atas dasar uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai pencemaran nama baik, untuk itu penulis mengambil judul ***Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik yang Melakukan Pembelaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sungguminasa).***

### ***B. Rumusan Masalah***

Untuk memperoleh hasil penelitian yang kualitatif dan memenuhi syarat-syarat ilmiah serta dapat memberikan kesimpulan yang sesuai dengan judul, maka perlu adanya pembatasan dan rumusan masalah. Hal ini sangat penting agar dalam pelaksanaan pengumpulan data dan analisis data tidak akan terjadi kekaburan dan menyimpang dari tujuan semula. Adapun batasan masalah yang dimaksud adalah mengenai penjatuhan sanksi pidana pencemaran nama baik yang melakukan pembelaan diri dan yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk penerapan sanksi pidana pencemaran nama baik yang melakukan pembelaan?

2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pencemaran nama baik yang melakukan pembelaan?
3. Bagaimanakah hukum Islam memandang sanksi pidana pencemaran nama baik yang melakukan pembelaan?

### ***C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian***

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini, maka penulis akan memaparkan pengertian beberapa variabel yang dianggap penting.

1. Sanksi pidana adalah suatu keputusan yang dijatuhkan oleh hakim pada sidang pengadilan dengan vonis kepada siapapun yang melanggar hukum.<sup>12</sup>
2. Pencemaran nama baik adalah perbuatan menghina atau menista orang lain atau menyerang nama baik atau kehormatan orang lain dan menyiarkan agar supaya diketahui umum atau baik secara lisan maupun tertulis.<sup>13</sup>
3. Membela adalah menjaga baik-baik, menolong, membebaskan dari ancaman atau tuduhan, memperjuangkan atau mempertahankan (pendapat atau hak-hak manusia).
4. Perspektif Hukum Islam
  - a. Perspektif adalah cara pandang seseorang terhadap suatu objek yang dipengaruhi oleh beberapa faktor.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> M. Marwan & Jimmy P., *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition* (Cet. I; Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 273.

<sup>13</sup> M. Marwan & Jimmy P., *Ibid.*, h. 499.

- b. Hukum Islam adalah segala ketentuan dan aturan yang berdasarkan nash (Al-Qur'an dan sunah).<sup>15</sup>

Sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan pembelaan dalam kasus pencemaran nama baik perspektif hukum Islam adalah suatu keputusan yang dijatuhkan oleh hakim pada sidang pengadilan dengan vonis kepada orang yang melakukan perbuatan menghina, menyerang nama baik atau kehormatan orang lain dan menyiarkan agar supaya diketahui umum atau baik secara lisan maupun tertulis dan penegasannya dalam Al-Qur'an dan hadis.

Ruang lingkup penelitian ini hanya meliputi pada sanksi pidana pencemaran nama baik yang melakukan pembelaan.

#### ***D. Kajian Pustaka***

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud di antaranya, sebagai berikut:

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, dalam buku ini dijelaskan tentang tindak-tindak pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Buku ini tidak menjelaskan tentang sanksi pidana terhadap pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik.

---

<sup>14</sup>Ismail Suyuti, *Sejarah Perpektif* (Yogyakarta: Cempaka, 1997), h. 7.

<sup>15</sup>Taufik Abdullah, *Paradigma Hukum Islam* (Surabaya: Risalah, 1998), h. 11.

Andi Hamzah dalam bukunya Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam buku ini dijelaskan tentang delik-delik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Buku ini hanya menguraikan delik-delik dalam tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Leden Marpaung dalam bukunya Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian & Penerapannya, dalam buku ini dijelaskan tentang tindak pidana terhadap kehormatan, tindak pidana terhadap kehormatan khusus (penghinaan khusus) dan penanganan perkara tindak pidana terhadap kehormatan.

Adapun perbedaan utama dengan penelitian penulis adalah bahwa beberapa buku di atas tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik yang Melakukan Pembelaan.

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan***

##### **1. Tujuan**

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana pencemaran nama baik yang melakukan pembelaan.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pencemaran nama baik yang melakukan pembelaan.



- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam memandang sanksi pidana pencemaran nama baik yang melakukan pembelaan.

## **2. Kegunaan**

### **a. Kegunaan Teoritis**

- 1) Penelitian ini di harapkan dapat memberi konstribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum pidana terkait dengan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik yang melakukan pembelaan. Dengan demikian, pembaca atau calon penelitian akan semakin mengetahui tentang sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik yang melakukan pembelaan.
- 2) Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik yang melakukan pembelaan berkaitan dengan masalah yang penulis utarakan di atas.

### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan untuk memberi sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum pada khususnya.
- 2) Hakim dalam mengambil keputusan bila nantinya menghadapi kasus yang serupa.

## ***F. Garis Besar Isi Skripsi***



Agar penelitian ini mudah dipahami oleh pembaca, dan menghindari kekeliruan dalam pembahasan, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab. Adapun sistematis penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas; latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional dan ruang lingkup penelitian, kajian pustaka, dan garis besar isi skripsi.

Bab kedua merupakan bab yang mendeskripsikan tentang tinjauan pustaka yang meliputi; pengertian sanksi pidana pencemaran nama baik, penerapan sanksi pidana pencemaran nama baik, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pencemaran nama baik yang melakukan pembelaan, dan hukum Islam memandang sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik yang melakukan pembelaan.

Bab ketiga merupakan bab yang secara khusus membahas tentang metodologi penelitian dari lokasi penelitian yang meliputi; jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data.

Bab keempat merupakan bab inti dari skripsi ini yang membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, bentuk-bentuk sanksi pidana pencemaran nama baik, dan kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi

pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik, dan upaya hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pencemaran nama baik.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang mengemukakan kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta implikasi hasil penelitian.

Daftar pustaka merupakan daftar buku-buku ataupun bahan referensi penulis dalam menulis skripsi ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik*

##### 1. Pengertian Hukuman/Sanksi Pidana

Sanksi menurut kamus bahasa Indonesia adalah hukuman, tindakan paksaan atas pelanggaran.<sup>1</sup>

Istilah pidana berasal dari bahasa Sansekerta (dalam bahasa Belanda disebut *straf* dan dalam bahasa Inggris disebut *penalty*) yang artinya hukuman. Hukuman adalah suatu keputusan yang dijatuhkan oleh hakim pada sidang pengadilan dengan vonis kepada siapapun yang melanggar hukum.<sup>2</sup>

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.<sup>3</sup>

Beberapa pengertian sanksi pidana berdasarkan pendapat para pakar di antaranya adalah:

---

<sup>1</sup> Indra Santoso, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (Surabaya: Pustaka Dua Surabaya, t.th), h. 362.

<sup>2</sup> M. Marwan & Jimmy P., *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition* (Cet. I; Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 273.

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 24.

- a. Sudarto, mengatakan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>4</sup>
- b. Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi bagi dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin, dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>5</sup>
- c. Utrecht berpendapat sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya.<sup>6</sup>
- d. J. E. Jankers, pakar hukum pidana dari Belanda mengatakan sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan.<sup>7</sup>

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada pelanggar

---

<sup>4</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), h. 2.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 27.

<sup>6</sup> Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II* (Surabaya: Pustaka Tirta Mas, 1987), h. 360.

<sup>7</sup> J. E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), h. 356.

yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu supaya pelanggar merasakan akibat perbuatannya dan sanksi pidana juga dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan.

## 2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Sebagaimana telah diketahui, bahwa hukuman itu adalah sanksi. Dengan sanksi dimaksudkan untuk menguatkan apa yang telah dilarang atau yang diperintahkan oleh ketentuan hukum. Terhadap orang yang melakukan pencemaran nama baik ketentuan hukum diambil tindakan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan yang bersangkutan.

Jenis sanksi pidana tercantum di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sanksi pidana ini juga berlaku bagi delik yang tercantum di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang. Jenis sanksi pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan.

Menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sanksi pidana terdiri atas:<sup>8</sup>

- a. Pidana pokok; dan
- b. Pidana tambahan

---

<sup>8</sup> Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHP, & KUHPdt)* (Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2008), h. 6.

### a. Pidana Pokok

Pidana pokok yang dicantumkan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana terdiri dari:<sup>9</sup>

- 1) pidana mati;
- 2) pidana penjara;
- 3) pidana kurungan;
- 4) pidana denda; dan
- 5) pidana tutupan.

Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2006 pidana pokok terdiri dari:<sup>10</sup>

- 1) pidana penjara;
- 2) pidana tutupan;
- 3) pidana pengawasan; dan
- 4) pidana denda.

#### 1) Pidana Mati

Berdasarkan pada Pasal 69 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 19-20.

<sup>10</sup> Lihat Pasal 62 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2006

pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, tergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.<sup>11</sup>

Sanksi pidana ini adalah puncak dari segala sanksi pidana. Sanksi pidana terutama di dalam abad-abad terakhir telah banyak dipersoalkan di antara golongan yang setuju dan yang tidak setuju terhadap sanksi pidana ini. Salah satu yang dirasakan orang terhadap pidana mati ini ialah sifatnya yang mutlak, sifatnya yang tidak memungkinkan mengadakan perbaikan atau perubahan. Apabila sanksi pidana itu telah dijalankan, hakim sebagai manusia yang tidak luput dari kekeliruan dan meskipun di dalam suatu perkara nampaknya pemeriksaan dan bukti-bukti menunjuk kepada kesalahan terdakwa, akan tetapi karena kebenaran itu hanya pada Allah swt., tidaklah mustahil hakim itu, walaupun dengan segala kejujuran, keliru di dalam pandangan dan pendapatnya.

Di Indonesia, semakin banyak perbuatan yang diancam dengan pidana mati. Perbuatan yang diancam dengan pidana mati di Indonesia antara lain adalah:

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 29.

- a) Pasal 104 KUHP (makar terhadap Presiden);
- b) Pasal 112 KUHP (membujuk negara asing berperang);
- c) Pasal 124 ayat (3) KUHP (menyerahkan kekuasaan dan menganjurkan hura-hura);
- d) Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar pada negara sahabat);
- e) Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana);
- f) Pasal 444 KUHP (pembajakan laut dengan akibat kematian);
- g) Pasal 479k ayat (2) dan Pasal 479o ayat (2) KUHP (kekerasan dalam pesawat dengan akibat kematian).

Pelaksanaan pidana mati diatur dalam peraturan perundang-undangan Nomor 2 Tahun 1964, yaitu:<sup>12</sup>

- a) di tembak mati;
- b) di tempat penjatuhan sanksi pidana pengadilan tingkat pertama;
- c) regu tembak (1 Perwira, 1 Bintara, dan 12 Tamtama);
- d) berdiri, duduk, dan berlutut;
- e) sasaran tembak jantung;

## **2) Pidana Penjara**

Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan.<sup>13</sup> Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi

---

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo, *op.cit.*, h. 78.

<sup>13</sup> Teguh Prasetyo, *op.cit.*, h. 78.



kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Permayarakatan) di mana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk, mentaati, dan menjalankan semua peraturan perundangan tata tertib yang berlaku. Dalam Pasal 12 KUHP menyatakan bahwa pidana penjara adalah sepanjang hidup dan sementara waktu.

Pidana penjara seumur hidup diancamkan pada kejahatan-kejahatan yang sangat besar, yakni:

- a) sebagai pidana alternatif dari pidana mati, seperti Pasal 104, Pasal 365 ayat (4), dan Pasal 368 ayat (2); dan
- b) berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara paling lama 20 tahun, misalnya Pasal 106, dan Pasal 108 ayat (2).<sup>14</sup>

Dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa pidana penjara sementara waktu, paling rendah satu hari dan paling lama lima belas tahun. Pidana penjara sementara dapat dijatuhkan melebihi dari lima belas tahun secara berturut-turut.<sup>15</sup>

Pidana penjara disebut juga pidana hilang kemerdekaan. Tidak hanya itu, tapi narapidana juga kehilangan hak-hak tertentu, diantaranya:

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, h. 34.

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Ibid.*, h. 34.

- a) hak untuk memilih dan dipilih;
- b) hak untuk memangku jabatan politik;
- c) hak untuk bekerja di perusahaan;
- d) hak untuk mendapatkan perizinan tertentu;
- e) hak untuk mengadakan asuransi hidup;
- f) hak untuk kawin, dan lain-lain.

### **3) Pidana Kurungan**

Pidana kurungan seperti halnya dengan pidana penjara maka dengan pidana kurungan pun, terpidana selama menjalani sanksi pidana, kehilangan kemerdekaannya. Menurut Pasal 18 KUHP, lamanya pidana kurungan berkisar antara satu hari paling sedikit dan satu tahun paling lama. Di dalam beberapa hal pidana kurungan itu dapat dikenakan lebih lama, yaitu satu tahun empat bulan. pidana kurungan dianggap lebih ringan dari pidana penjara dan hanya diancam bagi peristiwa yang ringan sifatnya seperti di dalam kejahatan yang tidak disengaja dan di dalam hal pelanggaran.

### **4) Pidana Denda**

Pidana denda adalah sanksi pidana berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.<sup>16</sup> Pidana denda diancamkan

---

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo *op.cit.*, h. 84.

pada banyak jenis pelanggaran baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan *culpa*, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.<sup>17</sup>

Beberapa pelanggaran sanksi pidana dianggap kurang cukup dengan ancaman pidana denda walaupun sifatnya pidana ini ditujukan pada orang yang bersalah, akan tetapi berlainan dengan sanksi pidana lainnya, yang tidak dapat dijalankan diderita orang yang dikenai sanksi pidana. Di dalam hal pidana denda tidak dapat dihilangkan kemungkinan, bahwa sanksi pidana itu dibayar oleh pihak ketiga.

Berbeda dengan sanksi pidana lain, maka di dalam pidana denda, sanksi pidana itu dapat dirubah menjadi kurungan sebagai pengganti. Dikenakan sanksi pidana dapat memilih, membayar denda atau kurungan sebagai gantinya.

Menurut Pasal 30 ayat (3) KUHP, lamanya pidana kurungan pengganti denda ditentukan secara kasus dari kasus dengan putusan hakim, minimum umum satu hari dan maksimum enam bulan. Menurut Pasal 30 ayat (5) KUHP, maksimum ini dapat dinaikkan menjadi delapan

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, h. 40.

bulan dalam hal gabungan (*concursum*) *resedive*, dan delik jabatan menurut Pasal 52 dan Pasal 52 bis.

Kurungan itu dapat saja dihentikan segera, setelah terhukum membayar dendanya. Jangka waktu untuk membayar denda ditentukan oleh jaksa yang mengeksekusinya, dimulai dengan waktu dua bulan dan diperpanjang menjadi satu tahun.

### **5) Pidana Tutupan**

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.” Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih cepat.<sup>18</sup> Pidana tutupan disediakan pada politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Tetapi dalam praktek peradilan dewasa ini, tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, h. 80.

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 itu ditetapkan bahwa di dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, maka hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Dari Pasal 1 undang-undang tersebut ternyata pidana tutupan itu dimaksudkan untuk menggantikan pidana penjara.

#### **b. Pidana Tambahan**

Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan.

Pidana tambahan terdiri atas:

- 1) pidana pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) pidana perampasan barang-barang tertentu;
- 3) pidana pengumuman keputusan hakim.

Dalam WvS Belanda, ada empat jenis pidana tambahan, selain tiga jenis seperti yang terdapat dalam Pasal 10 sub Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada satu jenis pidana tambahan yaitu pidana penempatan disatu latihan kerja negara, yang diancamkan hanya pada tindak tertentu saja (pengemisan, gelandangan, mabuk secara terus-menerus).

##### **1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu**

Pencabutan segala hak yang dipunyai atau diperoleh orang sebagai warga disebut *burgerlijke dood*, tidak diperkenankan oleh undang-undang

sementara. Hak-hak yang dapat dicabut oleh keputusan, dimuat dalam Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:<sup>19</sup>

- a) hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b) hak memasuki Angkatan Bersenjata;
- c) hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan hukum;
- d) hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- e) hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f) hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

Untuk berapa lamanya hakim dapat menetapkan berlakunya pencabutan hak-hak tersebut, hal ini dijelaskan dalam Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:<sup>20</sup>

- a) dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan hak adalah seumur hidup;

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, h. 44.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 45.

- b) dalam hal pidana penjara selama waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
- c) dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling tinggi lima tahun.

## 2) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Perampasan merupakan suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan.<sup>21</sup>

Dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,<sup>22</sup> dijelaskan barang-barang yang dapat dirampas, yaitu:

- a) barang-barang yang berasal atau diperoleh dari hasil kejahatan;
- b) barang-barang yang sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.

Ada tiga prinsip dasar dari pidana perampasan barang tertentu, ialah:

- a) hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan terhadap dua jenis barang tersebut dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, h. 49.

<sup>22</sup> Solahuddin, *op.cit.*, h. 15.

- b) hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan oleh hakim pada kejahatan saja, dan tidak pada pelanggaran, kecuali beberapa tindak pidana pelanggaran, misalnya Pasal 502, Pasal 519, dan Pasal 549;
- c) hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan oleh hakim barang-barang milik terpidana saja<sup>23</sup>

Jika barang itu tidak diserahkan atau harganya tidak dibayar, maka harus diganti dengan kurungan. Lamanya kurungan ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Jika barang itu dipunyai bersama, dalam keadaan ini, perampasan tidak dapat dilakukan karena sebagian barang kepunyaan orang lain akan terampas pula.

### 3) Pengumuman Putusan Hakim

Di dalam Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ditentukan bahwa “apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan yang lain.” Ketetapan lain yang harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana.

Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang misalnya

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, h. 50.



terdapat dalam Pasal 128, Pasal 206, Pasal 361, Pasal 377, Pasal 395, dan Pasal 405.<sup>24</sup>

Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Tetapi pengumuman putusan hakim sebagai suatu pidana bukanlah seperti yang disebutkan di atas. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu *publikasi ekstra* dari suatu putusan pembedaan seseorang dari pengadilan pidana.<sup>25</sup>

Terhadap orang-orang yang melakukan peristiwa pidana sebelum berusia enam belas tahun, sanksi pidana pengumuman tidak boleh dikenakan.

### 3. Penjatuhan Pidana Bersyarat

Walaupun sering disebut dengan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*), tetapi sesungguhnya bukan salah satu jenis pidana karena tidak disebutkan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena bukan jenis pidana melainkan suatu sistem penjatuhan pidana tertentu (penjara, kurungan, dan denda) di mana ditetapkan dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhkan itu tidak perlu dijalankan dengan pembebanan syarat-syarat tertentu, maka sebaiknya digunakan istilah pidana dengan bersyarat.

---

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, h. 53.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 53-54.

Pidana dengan bersyarat, yang dalam praktik hukum sering juga disebut dengan pidana percobaan, adalah suatu sistem atau model penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Maksudnya, pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan kepada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya.

Manfaat penjatuhan pidana dengan bersyarat ini adalah memperbaiki penjahat tanpa harus memasukkannya ke dalam penjara, maksudnya tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan dalam penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi seseorang terpidana, terutama bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana karena dorongan faktor tertentu yang tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya, dalam arti bukan penjahat yang sesungguhnya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana bersyarat merupakan sanksi pidana masa percobaan terhadap terpidana dengan ketentuan tidak boleh melakukan suatu tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa selama masa percobaan terpidana harus mengganti seluruh atau sebahagian kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan pidananya. Di samping itu, dapat pula ditentukan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi sepanjang atau sebagian dari masa percobaannya.

Namun, syarat-syarat itu tidak boleh mengurangi kemerdekaan agama, kemerdekaan politik dari terpidana. Jadi, sebenarnya sistem sanksi pidana di Indonesia memungkinkan hakim untuk memutuskan pidana bersyarat bagi seseorang dengan syarat khusus melakukan pelayanan masyarakat untuk suatu waktu tertentu selama masa percobaan.

Namun, belum ada hakim yang memberikan putusan seperti itu, sebenarnya penerapan sanksi pidana bersyarat mengandung beberapa keuntungan. Beberapa keuntungan itu antara lain:<sup>26</sup>

- a. memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di dalam masyarakat:
- b. memberikan kesempatan kepada terpidana untuk berpartisipasi dalam pekerjaan-pekerjaan, yang secara ekonomis menguntungkan masyarakat dan keluarga: dan
- c. biaya yang harus ditanggung negara lebih murah dibandingkan dengan pidana penjara atau pidana kurungan.

Sehingga dalam prakteknya lembaga pidana bersyarat ini tidak dapat diterapkan secara optimal karena beberapa alasan, yaitu antara lain:<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, h. 54.

<sup>27</sup> Muliadi dan Barda Nawawi, *op.cit.*, h. 121.

- a. belum adanya pedoman yang jelas tentang penerapan pidana bersyarat, yang mencakup hakekat, tujuan yang hendak dicapai serta ukuran-ukuran di dalam penjatuhan pidana bersyarat;
- b. belum melembaganya pola-pola pengawasan dan pembinaan dan sistem kerjasama dalam pengawasan dan pembinaan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat;
- c. Jaksa dan hakim masih sangat selektif dan membatasi diri dalam menentukan dan menjatuhkan sanksi pidana bersyarat. Padahal sebenarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan kemungkinan untuk menerapkan sanksi pidana bersyarat secara lebih luas. Dalam Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditentukan bahwa hakim dapat menetapkan pidana dengan bersyarat dalam putusan pemidanaan apabila:
  - a. Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun;
  - b. Hakim menjatuhkan pidana kurungan (bukan kurungan pengganti denda maupun kurungan pengganti perampasan barang);
  - c. Hakim menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan ialah: (a) apabila benar-benar ternyata pembayaran denda atau perampasan barang yang ditetapkan dalam keputusan ini menimbulkan keberatan yang sangat bagi terpidana, dan (b) apabila pelaku tindak pidana yang dijatuhi denda

bersyarat itu bukan berupa pelanggaran yang berhubungan dengan pendapatan negara.

Dilihat dari namanya, pidana bersyarat, ada syarat-syarat yang ditetapkan dalam putusan hakim, yang harus ditaati oleh terpidana untuk dapatnya dibebankan dari pelaksanaan pidananya itu. Syarat-syarat itu dibedakan antara syarat umum dan syarat khusus.

Syarat umum bersifat *imperatif*, maksudnya bila hakim menjatuhkan pidana dengan bersyarat, dalam putusannya itu harus ditetapkan syarat umum, sedangkan syarat khusus bersifat *fakultatif* (tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan).

#### **4. Pengertian Pencemaran Nama Baik**

Menurut *frase* (bahasa Inggris) pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation, slander, libel* artinya pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah tertulis.

Menurut pengertian umum pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.<sup>28</sup> Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk “pembunuhan karakter” yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena pelanggaran Hak Asasi Manusia

---

<sup>28</sup> R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), h. 330.

merupakan masalah dalam masyarakat umum, maka hukum pidana mengkomodasinya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut Kamus Hukum mengatakan, pencemaran nama baik adalah perbuatan menghina atau menista orang lain atau menyerang nama baik atau kehormatan orang lain dan menyiarkan agar supaya diketahui umum atau baik secara lisan maupun tertulis.<sup>29</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan, penghinaan atau pencemaran nama baik, yaitu segala penyerangan kehormatan dan nama baik seseorang dengan tidak memuat suatu tuduhan melakukan perbuatan tertentu atau tidak ditujukan untuk menyiarkannya kepada khalayak ramai dapat dihukum tetapi terbatas pada cara-cara melakukannya yang tertentu.

Menurut R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Orang yang diserang nama baiknya biasanya merasa malu, kehormatan yang diserang disini bukan kehormatan dalam lapangan seksual.<sup>30</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pencemaran nama baik adalah perbuatan menghina atau menista orang lain atau

---

<sup>29</sup> M. Marwan & Jimmy P., *op.cit.*, h. 499.

<sup>30</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeria, 1996), h. 225.

menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan maksud untuk menyiarkan agar supaya diketahui umum baik secara lisan maupun tertulis.

Adapun pasal-pasal yang merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yaitu:

a. Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP

Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, dengan cara menyiarkan, menunjukkan, menempelkan di muka umum, diancam pidana penjara enam tahun.

b. Pasal 142 KUHP

Penghinaan terhadap Raja/Kepala negara sahabat, diancam pidana penjara lima tahun.

c. Pasal 143 dan Pasal 144 KUHP

Penghinaan terhadap wakil negara asing, diancam pidana penjara lima tahun.

d. Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 KUHP

Penghinaan terhadap Penguasa dan Badan Usaha Umum diancam pidana penjara enam tahun.

e. Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, dan Pasal 316 KUHP

Penyerangan/pencemaran kehormatan atau nama baik seseorang, tuduhan dengan tulisan, diancam pidana penjara sembilan bulan, dan enam belas bulan.

f. Pasal 317 KUHP

Fitnah pemberitahuan palsu, pengaduan palsu, diancam pidana penjara empat tahun.

g. Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP

Penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap orang mati, diancam pidana penjara empat bulan.

### 5. Jenis-Jenis Pencemaran Nama Baik

Menurut R. Soesilo, penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada 6 macam yaitu:

- a. Menista secara lisan (*smaad*)
- b. Menista dengan surat atau tertulis (*smaadschrift*)
- c. Memfitnah (*laster*)
- d. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*)
- e. Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*)
- f. Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmakng*).<sup>31</sup>

**a. Menista secara Lisan (*smaad*)**

Perkataan menista berasal dari kata nista. Sebagian pakar mempergunakan kata celaan. Kata menista pada umumnya orang berpendapat bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana.<sup>32</sup> Menista diatur dan diancam

---

<sup>31</sup> *Op.cit.*, h. 225.

<sup>32</sup> Ledeng Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian & Penerapan*, (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), h. 12.



dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).<sup>33</sup>

**b. Menista dengan surat atau tertulis (*smaadschrift*)**

Menista secara surat atau tertulis diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, diperuntukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

**c. Memfitnah (*laster*)**

Memfitnah adalah jika tuduhan itu diminta untuk dibuktikan kebenarannya oleh hakim tapi terdakwa tidak membuktikannya dan bertentangan dengan yang diketahui.

Ketentuan hakim untuk meneliti kebenaran tuduhan pelaku terhadap korban juga dapat diadakan apabila korban adalah pegawai negeri, dan dituduh melakukan suatu perbuatan tercela dalam menjalankan jabatan. Konsekuensi dari ketentuan hakim adalah pemeriksaan perkara beralih kepada tindak pidana memfitnah dalam Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>33</sup> Solahuddin, *op.cit.*, h. 76-77.

Dalam hal ini, pelaku harus membuktikan kebenaran tuduhannya. Jika gagal, dianggap tuduhan itu dilakukan dengan kebohongan dari tuduhan itu, maka pelaku dapat dihukum karena memfitnah dengan sanksi pidana yang lebih berat, yaitu maksimum empat tahun penjara.

**d. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*)**

Dalam kamus bahasa Belanda kata *eenvoudige* maksudnya sederhana, bersahaja, ringan. Dengan demikian, tidak tepat jika dipergunakan penghinaan biasa.<sup>34</sup> Penghinaan ringan diatur dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sebagai berikut:

Tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan surat yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau dengan surat, baik di muka orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan (*feitelijkheid*), ataupun dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, dan diancam dengan hukuman penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus ribu.

**e. Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*)**

Mengadu secara memfitnah diatur dan diancam dalam Pasal 317 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya diserang, diancam telah melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 Nomor 1-3 dapat dijatuhkan.

**f. Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*).**

Tuduhan secara memfitnah diatur dan diancam dalam Pasal 318 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

---

<sup>34</sup> Ledeng Marpaung, *op.cit.*, h. 41.

Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu delik, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 Nomor 1-3 dapat dijatuhkan.

## 6. Perbuatan Yang Dapat Dikategorikan sebagai Pencemaran Nama Baik

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik adalah:

### a. Penghinaan di muka umum

Melakukan penghinaan ataupun tindakan lain yang menjatuhkan martabat orang lain di muka umum. Penghinaan di muka umum dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan, melanggar kesusilaan, dan merusak kerukunan. Oleh karena itu, tindakan pencemaran nama baik perlu diberikan sanksi. Istilah di muka umum tidak berarti selalu di tempat umum, tetapi juga dapat meliputi satu rumah kediaman dengan dihadiri dengan banyak orang. Sebaliknya, apakah penghinaan diucapkan di tempat umum, tetap hanya terhadap seorang saja, bukan orang yang dihina dan tidak dimaksudkan agar disampaikan kepada orang itu, maka tidak ada tindak pidana ini.<sup>35</sup>

### b. Penghinaan di muka orangnya sendiri

Ini meliputi pengucapan dengan telepon langsung kepada orang yang dihina karena praktis tidak ada perbedaan dengan *face to face*. Mengenai penghinaan dengan perbuatan, jadi tanpa mengucapkan satu kata pun, mungkin ada banyak pendapat yang berlainan, sampai di mana perbuatan ini

---

<sup>35</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Cet, III; Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h. 103.

merupakan penghinaan. Barangkali, seseorang dengan tertawa saja sudah menyinggung orang yang merasa ditertawakan.<sup>36</sup>

## 7. Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik

Sanksi pidana pencemaran nama baik adalah suatu keputusan yang dijatuhkan oleh hakim pada sidang pengadilan pada seseorang yang melakukan perbuatan menghina, menyerang nama baik atau kehormatan orang lain, dan menyiarkan agar supaya diketahui umum baik secara lisan maupun tertulis.

Mengenai sanksi pidana diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pidana pokok, terdiri atas:
  - 1) pidana mati;
  - 2) pidana penjara;
  - 3) pidana kurungan;
  - 4) pidana denda; dan
  - 5) pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan, terdiri atas:
  - 1) pencabutan hak-hak tertentu;
  - 2) perampasan barang-barang tertentu; dan
  - 3) pengumuman putusan hakim.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ketentuan pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan:

Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).<sup>37</sup>

Delik penghinaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditujukan untuk perbuatan yang dilakukan oleh semua orang, tidak ditujukan untuk subyek hukum tertentu atau untuk profesi tertentu. Oleh karena itu, pelanggaran larangan dalam pasal tersebut adalah siapa saja. Terhadap pasal yang memuat larangan untuk melakukan penghinaan (tindak pidana penghinaan) ditujukan untuk melindungi “kehormatan nama baik” seseorang dan mendorong agar setiap orang menghormati atau memperlakukan secara terhormat terhadap orang lain sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia dan kemanusiaan.

## 8. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam terdiri atas dua kata, yaitu hukum dan Islam. Hukum adalah peraturan yang dibuat dan disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis, peraturan, undang-undang yang mengikat perilaku setiap masyarakat tertentu. Menurut ahli ushul fiqih, hokum adalah perintah Allah swt. yang menuntut

---

<sup>37</sup> Solahuddin, *op.cit.*, h. 76-77.

mukalaf untuk mengerjakan atau memilih antara mengerjakan dan tidak mengerjakan sesuatu. Adapun menurut ahli fiqih, hokum adalah efek yang timbul dari perbuatan yang diperintahkan Allah swt.<sup>38</sup> Sedangkan Islam adalah agama yang dibawah atau diajarkan Nabi Muhammad saw. yang berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an.<sup>39</sup> Jadi, hukum Islam adalah sekumpulan peraturan Allah swt. untuk dikerjakan umat Islam. Peraturan-peraturan itu terdiri atas perintah-perintah serta larangan yang tertulis dalam Al-Qur'an.

Hukum Islam adalah segala ketentuan dan aturan yang berdasarkan nash (Al-Qur'an dan sunah).<sup>40</sup> Adapun pengertian hukum Islam adalah hukum yang bersumber pada nilai-nilai keislaman yang berasal dari dalil-dalil agama Islam, dimana konsepsi, dasar, dan hukumnya berasal dari Allah swt. Bentuk hukumnya dapat berupa kesepakatan, larangan, anjuran, ketetapan dan sebagainya. Hukum Islam hanya ditujukan kepada orang-orang yang beragama Islam dan tidak berlaku pada orang-orang non-Islam. Ditetapkan berdasarkan wahyu-wahyu Allah swt. mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain, manusia dengan diri sendiri, dan manusia dengan Allah swt.

---

<sup>38</sup> Khustan Haludhi, Abdurrohman Sa'id, *Integrasi Budi Pekerti dalam Pendidikan Agama Islam* (Malang: Tiga Serangkai, 2004), h. 40.

<sup>39</sup> Indra Santoso, *Kamus Praktik Bahasa Indonesia* (Surabaya: Pustaka Dua, t.th.), H. 195.

<sup>40</sup> Taufik Abdullah, *Paradigma Hukum Islam* (Surabaya: Risalah, 1998), h. 11.

### ***B. Bentuk Penerapan Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik yang Melakukan Pembelaan***

Pada dasarnya terhadap seseorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa sanksi pidana. Akan tetapi ada kalanya dikenakan suatu sanksi pidana yang sebenarnya tidak merupakan pidana, melainkan suatu tindakan tertentu yang mirip dengan sanksi pidana perdata.

Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancam atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau yang membahayakan kepentingan hukum, serta proses jalanya pembangunan nasional. Tetapi masyarakat juga menyadari sanksi pidana bersifat *ultimum remedium* atau senjata pamungkas, atau dalam bahasa adalah kebijakan atau manajemen, “jalan terakhir yang ditempuh, dari berbagai solusi atau alternatif solusi lainnya.” Dari penjelasan singkat di atas secara *implisit* terhadap suatu kesimpulan, yaitu harus adanya efisiensi dalam penggunaan sanksi pidana.

Mengenai sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

a. Pidana pokok, terdiri atas:

- 1) pidana mati;
- 2) pidana penjara;
- 3) pidana kurungan;



- 4) pidana denda; dan
  - 5) pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan, terdiri atas:
- 1) pencabutan hak-hak tertentu;
  - 2) perampasan barang-barang tertentu; dan
  - 3) pengumuman putusan hakim.

Pasal pencemaran nama baik yang menjunjung adat dan budaya timur tidak hanya ada di Indonesia. Pakar perbandingan hukum dari Kanada Daniel Mendel, mengatakan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berbicara diterapkan di semua negara dan telah diakui oleh hukum internasional. Menurutnya, pembatasan tersebut dibuat untuk melindungi keamanan nasional, kepentingan umum, dan reputasi seseorang. Sehingga seorang warga negara tidak diperbolehkan membicarakan gosip dan mengeluarkan pernyataan yang keliru.

Menurut pengertian umum pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Kehormatan adalah perasaan pribadi di atas harga diri, sedangkan nama baik adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang berhubungan dengan kedudukannya di dalam masyarakat. Jadi nama baik ditujukan kepada orang yang memiliki kedudukan tinggi.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik diatur dan dirumuskan dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang



terdiri dari tiga ayat, yaitu<sup>41</sup> ayat pertama “Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).” Ayat kedua “jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, diperuntukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Ayat ketiga “tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, bila perbuatan itu jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”

Pasal pencemaran nama baik ini merupakan delik aduan, artinya, pelaku pencemaran nama baik dapat diproses secara hukum jika pihak-pihak yang dirugikan melepaskan perbuatannya. Sebaliknya, jika pihak yang dirugikan tidak melaporkan, maka tidak dapat diproses secara hukum.

Adapun sanksi pidana penjara maksimal kasus-kasus pencemaran nama baik adalah empat bulan dua minggu untuk penghinaan ringan sampai dengan empat tahun untuk tindakan fitnah yang dianggap berat. Terhadap pelaku yang dikenakan sanksi pidana bersyarat dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, majelis hakim memberikan pidana bersyarat, bahwa pidana yang diputuskan atau dijatuhkan

---

<sup>41</sup> Solahuddin, *op.cit.*, h. 76-77.

tidak akan dijalani terpidana, kecuali kemudian majelis hakim memerintahkan supaya dijalani karena terpidana sebelum habis masa percobaan melanggar syarat umum yaitu melakukan suatu tindak pidana.

Praktek sanksi pidana semacam ini kiranya jarang sekali sampai dijalankan oleh karena terhukum akan berusaha benar-benar dalam masa percobaan tidak melakukan suatu tindak pidana, dan syarat khusus biasanya dipenuhi. Di samping itu, apabila syarat-syarat dipenuhi, sanksi pidana tidak otomatis dijalankan, tetapi harus ada putusan lagi dari hakim. Sehingga, ada kemungkinan hakim belum memerintahkan supaya sanksi pidana dijalankan, yaitu apabila misalnya terhukum dapat menginsyafkan hakim, bahwa terhukum dapat dimaafkan dalam hal ini tidak memenuhi syarat.<sup>42</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana bersyarat merupakan sanksi pidana masa percobaan terhadap terpidana dengan ketentuan tidak boleh melakukan suatu tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa selama masa percobaan terpidana harus mengganti seluruh atau sebahagian kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan pidananya. Di samping itu, dapat pula ditentukan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi sepanjang atau sebagian dari masa percobaannya.

---

<sup>42</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, h. 18.

Adapun pemberian sanksi pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dihubungkan dengan tujuan pemidanaan lebih ditujukan pada *resosialisasi* terhadap pelaku tindak pidana daripada pembatasan terhadap perbuatan. Tujuan pemidanaan ini merupakan tujuan yang lebih maju karena dalam tujuan pemidanaan ini terpidana harus diperbaiki. Ini didasarkan pada pendapat bahwa manusia pelanggaran hukum mempunyai kelainan-kelainan dari manusia biasa yang menyebabkan mereka berbuat jahat.

Akibat daripada serangan ini, biasanya penderita akan merasa malu. Kehormatan yang diserang disini bukan kehormatan dalam bidang seksual, tetapi kehormatan yang menyangkut nama baik dan perasaan pribadi atas harga diri. Sedang nama baik adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang berhubungan dengan kedudukannya di dalam masyarakat. Jadi, nama baik ditujukan kepada orang yang memiliki kedudukan tinggi. Nama baik merupakan kehormatan luar, sedang kehormatan adalah kehormatan dalam.

Ketentuan pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik merupakan sanksi pidana bersyarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan

tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.<sup>43</sup>

### ***C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik yang Melakukan Pembelaan***

Menurut Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>44</sup>

Secara yuridis hakim merupakan pejabat negara yang mempunyai kebebasan dalam memutuskan setiap perkara, konsep kebebasan dalam konteks tersebut bukan merupakan kebebasan yang bersifat *absolut* akan tetapi kebebasan yang bertanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hati nurani, dan masyarakat serta harus selalu berpihak pada keadilan dan kebenaran.<sup>45</sup>

Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2004 yakni pada Pasal 52 telah diatur mengenai hal-hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim di dalam menjatuhkan putusannya. Pasal 52 ayat (1) rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa:

1. kesalahan pembuat tindak pidana;
2. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;

---

<sup>43</sup> Solahuddin, *op. cit.*, h. 7.

<sup>44</sup> Solahuddin, *Ibid.*, h. 147.

<sup>45</sup> Ismail Saleh, *Pembinaan Hakim* (Jakarta: Internusa, 1989), h. 81.

3. sikap batin pembuat tindak pidana;
4. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
5. cara melakukan tindak pidana;
6. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
8. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
9. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan
11. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Pedoman pemidanaan ini sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Di samping itu, pada Pasal 52 ayat (2) rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pula mengenai dasar pertimbangan hakim disana disebutkan:

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukannya perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak dijatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Beberapa faktor Internal yang mempengaruhi hakim mempertimbangkan suatu putusan adalah:

1. sikap perilaku yang *apriari*, yaitu prasangka atau dugaan bahwa terdakwa adalah pihak yang bersalah oleh karena rutinitas penanganan perkara yang menumpuk dan target penyelesaian yang tidak seimbang.

2. sikap perilaku *emosional*, yaitu sifat dasar hakim yang mempengaruhi hasil-hasil putusan.
3. sikap *arrogance power*, yaitu sikap arogan hakim bila merasa dirinya paling berkuasa dan pintar juga mempengaruhi hasil putusan.
4. Moral, yaitu benteng pribadi hakim dalam cobaan-cobaan yang mengarah pada penyimpangan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan adalah:

1. latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi, yaitu kondisi sosial yang berpengaruh pada cara pandangnya.
2. *profesionalisme*, yaitu pengetahuan, wawasan, keahlian, dan keterampilan.<sup>46</sup>

Menurut Soedarto, pedoman pemberian pidana yang bersifat umum belum dimuat, yang ada hanya aturan pemberian pidana.<sup>47</sup>

1. Hal-hal yang meringankan:

- a. masih muda;
- b. sopan;
- c. mengaku terus terang;
- d. belum pernah dihukum.

<sup>46</sup> Al-Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan Di Indonesia* (Yogyakarta: Atmajaya, 1997), h. 2.

<sup>47</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), h. 79.

2. Hal-hal yang memberatkan:

- a. memberi keterangan yang berbelit-belit;
- b. tidak menyesal;
- c. berbohong.

Hakim merupakan penegak hukum yang dapat mengadili suatu perkara sesuai dengan *in book* ataupun sesuai hati nurani di luar dari undang-undang yang mengaturnya hingga mencapai tahap akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hakim merupakan struktur negara yang mempunyai kebebasan untuk memutus perkara, akan tetapi hakim harus mempertanggungjawabkan kebebasan tersebut terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hati nurani, maupun masyarakat yang selaku berpijak akan tujuan dari putusan tersebut yaitu keadilan dan kebenaran. Hakim adalah satu-satunya pejabat penegak hukum yang lebih mengatas namakan Allah swt. dalam membuat keputusan.<sup>48</sup> Hakim sulit untuk dapat benar-benar berdiri sendiri karena hakim adalah manusia yang hidup antara manusia lainnya.<sup>49</sup> Di dalam pelaksanaan keputusan juga didasarkan adanya alasan-alasan yang mempunyai tujuan dari pemutusan tersebut, sehingga putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh rakyat dan putusan tersebut diterima oleh pengetahuan sehingga tidak adanya

---

<sup>48</sup> Ismail Saleh, *op.cit.*, h. 11.

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 53.



komentar yang negatif. Karena putusan hakim tersebut merupakan objek dari ilmu pengetahuan hukum yang dapat di analisa.<sup>50</sup>

Dalam melaksanakan fungsi peradilan, para hakim atau pengadilan harus sekaligus menghormati keadilan maupun hak asasi, meskipun batas keseimbangan penghormatan antara kebenaran dan keadilan serta penghargaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dalam menyelesaikan peristiwa pidana sangat sulit ditegaskan. Namun, kesulitan itu jangan sampai menjadi alasan teknis yang sempit dan kaku dalam memberi kebebasan bagi pelaku tindak pidana agar leluasa berkeliaraan di tengah kehidupan masyarakat.<sup>51</sup>

Hakim mutlak harus memiliki sikap yang teliti dan hati-hati dalam menghadapi setiap kasus tindak pidana yang dilimpahkan kepadanya yang akan diputus agar hakim tidak terjebak dalam kekeliruan atau kesalahan dalam penerapan hukum yang dapat mengakibatkan putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Hakim dalam mengembangkan amanah menegakkan keadilan, harus mampu menyelesaikan persoalan hukum dengan jaminan mendapatkan keadilan bagi pencari keadilan.

Sebagai contoh dari hal ini kasus pencemaran nama baik yang melakukan pembelaan, yang merasa tindak pidana yang sudah diatur secara *aplikatif*

---

<sup>50</sup> Sudikno, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 199.

<sup>51</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, t.th.), h. 27.



*representative* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XVI Buku II tentang Penghinaan, akan tetapi tidak efektif dapat berjalan karena hakim yang berhak menemukan hukumnya baik secara *inback* maupun secara individual tidak mengindahkan peraturan yang sudah mengaturnya.

Dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan mengenai pengertian dan kriteria membela kepentingan umum dan membela diri. Meskipun demikian, perbuatan membela kepentingan umum tersebut dapat berupa menunjukkan kekeliruan atau kelalaian yang nyata-nyata merugikan atau membahayakan pada umum dari pihak yang berwajib. Sedang putusan membela diri dapat berupa menunjukkan orang yang sebenarnya bersalah, dalam hal ini orang yang disangka melakukan perbuatan itu, padahal ia tidak melakukannya.<sup>52</sup>

Patut atau tidaknya pembelaan terhadap kepentingan umum dan pembelaan diri yang dikemukakan oleh terdakwa terletak pada pertimbangan hakim. Dalam hal ini, hakim baru akan mengadakan pemeriksaan apakah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa itu benar-benar terdorong demi membela kepentingan umum atau membela diri, apabila terdakwa meminta di periksa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 312 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal tersebut, antara lain dinyatakan bahwa pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbangkan

---

<sup>52</sup> R. Soesilo, *op.cit.*, h. 227.

keterangan terdakwa, bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri.

Apabila dalam pemeriksaan itu ternyata bahwa tindakan terdakwa yang melakukan pencemaran nama baik itu benar-benar membela kepentingan umum atau membela diri yang dianggap patut oleh hakim, maka terdakwa tidak dihukum. Sebaliknya, apabila apa yang dikatakan pembelaan terhadap kepentingan umum atau pembelaan diri itu tidak dianggap patut oleh hakim, dan apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak dipersalahkan melakukan pencemaran nama baik, melainkan dikenakan perbuatan memfitnah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya itu namun dia tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, maka dia diancam karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>53</sup>

Seharusnya hakim menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai dasar pertimbangannya dalam menangani perkara tindak pidana pencemaran nama baik. Karena Hak Asasi Manusia memiliki keterkaitan erat dengan perkara pencemaran nama baik, sehingga pelakunya seharusnya tidak serta merta diproses ke pengadilan.

Hak Asasi Manusia yang dapat terkait dengan perkara tindak pidana pencemaran nama baik tersebut adalah:

---

<sup>53</sup> Solahuddin, *op.cit.*, h. 77.

## 1. Hak konsumen

Hak konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu latar belakang pemikiran keluarnya undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditegaskan beberapa hak konsumen, sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. hak atas kekayaan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

---

<sup>54</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yado, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004), h. 38.

- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak *diskriminatif*;
- h. hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
- i. hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

## **2. Kebebasan berpendapat**

Kebebasan menyampaikan pendapat mereka merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>55</sup> Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut ditegaskan bahwa “setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Oleh karena itu, perbuatan menyampaikan pendapat atau kritik secara tertulis seharusnya dilihat pula sebagai bagian dari hak atas kebebasan berpendapat dan tidak serta merta dikenakan dengan ketentuan pencemaran nama baik.

## **3. Kemerdekaan atau kebebasan pers**

Kemerdekaan atau kebebasan pers diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam undang-undang pers tersebut dijelaskan

---

<sup>55</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 5.

bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia harus dijamin.<sup>56</sup>

#### **4. Hak pasien**

Hak pasien diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Praktik Kedokteran. Salah satu pertimbangan dikeluarkan undang-undang tersebut adalah untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan atau pasien. Pasien dalam menerima pelayanan kesehatan, mempunyai hak sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis;
- b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lainnya;
- c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis; dan
- d. menolak tindakan medis.

#### **5. Hak atas informasi**

Sebagai bagian dari hak setiap warga negara juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 14 ayat (2) ditegaskan bahwa “ setiap orang berhak untuk mencari, memiliki,

---

<sup>56</sup> Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa*, (Cet. I; Banteng: Pustaka Irvan, 2007), h. 185.

<sup>57</sup> Lihat Pasal 52 UU No. 29 Tahun 2002.

memperoleh, menyimpang, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis sarana yang tersedia.”



### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### ***A. Lokasi Penelitian***

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan, maka penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kabupaten Gowa dengan pertimbangan bahwa Gowa adalah kota padat penduduknya dan susunan masyarakat yang sangat kompleks sehingga untuk terjadi suatu tindak pidana pencemaran nama baik dapat terjadi, dan bahwa tempat tersebut dianggap sudah *representatif* untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti. Selain itu, penulis telah melakukan *survey* awal dan di lokasi penelitian pernah menangani kasus pencemaran nama baik, dengan alasan inilah penulis tertarik untuk melakukan studi di Pengadilan Negeri Sungguminasa tentang Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik yang melakukan pembelaan.

##### ***B. Jenis Penelitian***

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *deskriptif kualitatif*. *Kualitatif* yaitu jenis penelitian yang melukiskan atau menggambarkan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu. Penelitian ini, penulis menggambarkan bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim yang melakukan pembelaan terhadap kasus pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kabupaten Gowa.

### ***C. Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis pendekatan yaitu yuridis sosiologis dan syar'i.

1. *Yuridis sosiologis* yaitu metode ini bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara tindak pidana pencemaran nama baik yang menelaah putusan hakim yang bertentangan dengan undang-undang pencemaran nama baik, serta mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terdapat di masyarakat.<sup>1</sup>
2. *Syar'I* yaitu suatu pendekatan dengan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Al-qur'an dan hadis.

### ***D. Pengumpulan Data***

#### **1. Jenis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif. *Kualitatif* yaitu suatu jenis data yang mengategorikan data secara tertulis untuk mendapatkan data yang mendalam dan lebih bermakna.

#### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data pustaka (*library research*) dan data lapangan (*field research*).

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. III, Jakarta: UI Press, 1986), h. 55.



- a. *Library research* atau data kepustakaan, adalah dengan mengkaji literatur-literatur yang ada maupun sumber-sumber pustaka lain yang relevan dan mendukung guna memecahkan masalah yang berhubungan dengan aspek hukum. Data kepustakaan dapat diperoleh melalui *library research*, dengan ini penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan membaca dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari pengadilan, serta publikasi lainnya yang dipandang ada kaitannya dengan obyek penelitian yang dijadikan pembahasan.
- b. *Field research* atau data lapangan yaitu kegiatan langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh melalui angket yang dipandang meragukan. Data lapangan dapat diperoleh melalui *field research* dengan cara-cara seperti *interview*, berarti kegiatan aktif langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab kepada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas. Untuk penelitian ini wawancara dilakukan terhadap informan yaitu, terhadap para hakim yang telah menangani kasus pencemaran nama baik. Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara terstruktur yaitu melakukan kegiatan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan yang akan

dipertanyakan kepada informan untuk memperoleh data yang lebih lengkap. Penelitian dengan menggunakan angket tidak dapat digunakan karena dipandang meragukan. Oleh karena itu, peneliti tidak menggunakan angket.

*Field research* yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu populasi yang berarti seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>2</sup> Adapun jumlah perkara tindak pidana pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kabupaten Gowa dari tahun 2009 sampai tahun 2011 sebanyak enam kasus yaitu Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

#### a. Wawancara

*Wawancara* adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satuan topik tertentu.<sup>3</sup> Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara terstruktur yang berarti penulis melakukan kegiatan

---

<sup>2</sup> Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Data Media, 1994), h. 44-45.

<sup>3</sup> Esterbeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 97.

wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan penulis kepada informan untuk memperoleh data yang lebih lengkap.

b. Observasi

*Observasi* adalah suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis melalui pengamatan dengan panca indera.<sup>4</sup>

Observasi pada dasarnya adalah pengamatan terhadap sesuatu yang diteliti dengan menggunakan seluruh panca indra.<sup>5</sup> Jenis observasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu, observasi terstruktur dengan melakukan pengamatan di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kabupaten Gowa secara langsung dan memperhatikan kegiatan para informan dalam hal ini penegak hukum serta mengamati segala aktifitas dan kegiatan yang dilakukan para penegak hukum.

c. Dokumentasi

*Dokumentasi* adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung di tujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen-dokumen yang ada di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kabupaten Gowa, seperti tulisan yang berupa (peraturan, kebijakan buku register Perkara), serta gambar

---

<sup>4</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h. 172.

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 12.

atau (foto) sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

#### 4. Instrumen Pengumpulan Data

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran dan pengamatan, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian dinamakan instrumen penelitian. Instrumen pengumpulan data adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.
- b. Buku catatan atau alat tulis berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
- c. Kamera berfungsi untuk memotrek jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan.
- d. *Tape recorder* berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan dengan informan.

#### 5. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan prosedur penelitian sebagai berikut: Kegiatan penelitian ini dimulai dengan memperoleh izin penelitian dari

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, kemudian surat tersebut diteruskan ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Bagian Balitbangda. Surat izin yang diperoleh dari Kantor Gubernur tersebut, lalu diteruskan ke Kantor Bupati Kabupaten Gowa sesuai lokasi penelitian yang didisposisikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa pada bagian Kesbang yang pada akhirnya mendapatkan surat izin penelitian untuk ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Kabupaten Gowa. Setelah surat izin diperoleh penulis langsung membawa surat tersebut ke Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada bagian umum. Kunjungan awal ini sehubungan dengan akan melakukan kegiatan penelitian di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kabupaten Gowa. Kunjungan selanjutnya penulis di instruksikan ke bagian hukum pada kunjungan ini penulis di instruksikan lagi ke bagian pidana untuk mengambil nomor perkara tindak pidana pencemaran nama baik. Pada penelitian ini yang menjadi informan pada penelitian ini adalah hakim yang menangani kasus pencemaran nama baik. Penelitian dilakukan selama tiga Minggu, dengan informan sebanyak dua orang hakim yang menangani kasus pencemaran nama baik. Data penelitian yang diperoleh, kemudian dilakukan pengolahan dan analisis data.

#### ***E. Pengolahan Data dan Analisis Data***

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengolahan dan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu membandingkan data primer

dengan data sekunder, lalu diklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis, sehingga diperoleh suatu pengetahuan. Langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

- a. Mengorganisasi data, baik data yang diperoleh dari rekaman maupun data yang tertulis.
- b. Proses data dengan cara memilah-milah data, dengan cara sebagai berikut:
  - 1) *Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul tidak logis dan meragukan, oleh karena dipenuhi atau tidak *instruksi sampling*, dapat dibaca, atau tidak, kelengkapan pengisian, konsistensi, dan dapat atau tidak untuk dipahami.
  - 2) *Coding* adalah pemberian atau pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf-huruf yang memberikan petunjuk, atau identitas pada suatu informasi atau data yang dianalisis.
- c. Interpretasi data dengan cara menerjemahkan atau menafsirkan data yang sebelumnya telah dikategorikan.

Analisis data merupakan suatu tahap yang menentukan dalam suatu penelitian kualitatif. Analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Dalam hal ini apa yang dinyatakan oleh informan, baik secara tertulis

maupun secara lisan, diteliti dan dipelajari sebagai bahan utuh. Atas dasar tersebut, maka dapat diperoleh gambaran yang objektif mengenai kenyataan yang ada dalam masyarakat, sehubungan dasar pertimbangan hakim terhadap sanksi pidana pencemaran nama baik yang melakukan pembelaan.

Hasil analisa data tersebut beberapa data yang lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan kemudian selanjutnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebaagi hasil akhir.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

##### **1. Sejarah Pengadilan Negeri Sungguminasa**

Sejak tahun 1959 perkara-perkara dalam wilayah hukum di Kabupaten Gowa disidang di Pengadilan Negeri Makassar. Baru pada tahun 1964 pengadilan dibentuk di Kabupaten Gowa dan berkantor sementara di Kantor Daerah Kabupaten Gowa dan bernama Pengadilan Ekonomi Sungguminasa. Di Kantor Daerah Kabupaten Gowa, Pengadilan Ekonomi Sungguminasa hanya menempati satu ruangan sehingga perkara-perkara yang ada di Pengadilan Negeri Sungguminasa masih disidang di Pengadilan Negeri Makassar.

Beberapa bulan setelah resmi dibentuk juga di tahun 1964 Gedung Kantor Pengadilan Ekonomi Sungguminasa selesai dibangun. Gedung Kantor Pengadilan Ekonomi Sungguminasa beralamat di jalan HOS Cokroaminoto Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (sekarang Kantor Bank Sulawesi Selatan Cabang Gowa). Namun status kantor adalah pinjam pakai dari pemerintah Kabupaten Gowa tetapi persidangan perkara masih dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar sampai dengan tahun 1970-an. Pada tahun 1965 Pengadilan Ekonomi Sungguminasa berubah menjadi Pengadilan Negeri Sungguminasa kelas II A.



Karena gedung kantor sudah tidak *representatif* lagi, maka pada tanggal 25 Mei 1977 diusulkan permintaan gedung baru. Tahun 1979 gedung baru selesai dibangun dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Bapak H. Soeroto pada tanggal 02 Februari 1980 di jalan Usman Salengke No. 103 Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Tahun 2003 Pengadilan Negeri Sungguminasa diusul kenaikan kelas menjadi kelas IB dan pada tanggal 17 Februari 2005 Surat Keputusan kenaikan kelas menjadi kelas IB diterima. Peresmian peningkatan kelas Pengadilan Negeri Sungguminasa dari kelas II menjadi kelas I dilakukan oleh Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH. MCL pada tanggal 07 Maret 2005.

Setidaknya sejak tahun 1964 sampai sekarang, Pengadilan Negeri Sungguminasa Kabupaten Gowa telah terhitung 14 kali melakukan pergantian ketua pengadilan.

Table 1

Daftar nama ketua pengadilan sejak 1964 sampai sekarang adalah sebagai berikut:

NO	N A M A	MASA KERJA
1	H. ABDUL MADJID M., SH	1964 – 1971
2	M. SIRINGO RINGO., SH	1971 – 1980
3	MANNAN RAHMAN., SH	1980 – 1986
4	MARSOEDI TJOKRO WASKITO., SH	1986 – 1990
5	I KETUT GALUNG ASTIKA , SH	1990 – 1993

6	H. .M ARSYAD SANUSI, SH.	1993 – 1996
7	MUHAMMAD, SH.	1996 -1998
8	ANDI NORMA, SH.	1998 -1999
9	H.A.MUH. YUNUS P., SH.	1999 -2004
10	HANIZAH IBRAHIM M., SH.	2004 -2005
11	H. LEXSY MAMONTO, SH., MH.	2005 – 2007
12	AGUS BUDIARTO, SH., MH.	2007 – 2008
13	A. ISNA RENISHWARI CINRAPOLE, SH.	2008-2011
14	ENNID HASANUDDIN, SH., CN., MH.	2011- sekarang

## 2. Visi dan Misi

Pengadilan Negeri Sungguminasa Kabupaten Gowa adalah salah satu pengadilan tingkat pertama yang ada di Kabupaten Gowa. Seperti misi pengadilan-pengadilan lain yang ada di Indonesia, Pengadilan Negeri Sungguminasa bertujuan menciptakan nilai-nilai keadilan yang luhur sesuai cita-cita bangsa secara jelas. Visi dan misi Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah sebagai berikut:

### a. Visi

Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapat kepercayaan publik, profesional, dan memberikan pelayanan hukum berkekuatan, ethis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat, serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

b. Misi

- 1) Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat;
- 2) Mewujudkan peradilan yang mandiri dan *independen* dari campur tangan pihak lain;
- 3) Memperbaiki akses layanan yang mandiri dan *independen* dari campur tangan pihak lain;
- 4) Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan dalam masyarakat;
- 5) Memperbaiki kualitas *input internal* pada proses peradilan; dan
- 6) Mewujudkan *institusi* peradilan yang efektif, efisien, bermartabat, dan dihormati.

### 3. Wilayah Hukum

Luas wilayah kerja Pengadilan Negeri Sungguminasa yang terdiri dari 18 kecamatan adalah 1.883,33 kilometer persegi. Dengan 9 kecamatan yang berada pada ketinggian 100 meter dari permukaan laut. Batas-batas wilayah secara umum, yaitu:<sup>1</sup>

Sebelah Utara : Kotamadya Makassar, Kabupaten Maros ;  
 Sebelah Timur : Kabupaten Sinjai, Bone, Bulukumba dan Bantaeng ;  
 Sebelah Selatan : Kabupaten Takalar dan Jeneponto ;  
 Sebelah Barat : Kotamadya Makassar dan Kabupaten Takalar ;

---

<sup>1</sup> [www.pengadilannegerisungguminasa.com](http://www.pengadilannegerisungguminasa.com), Diakses tanggal 20 Juli 2012.

Tabel 2

Batas-batas wilayah secara khusus :<sup>2</sup>

No.	Kecamatan	Batas Wilayah				Luas Area (km <sup>2</sup> )	Banyaknya Desa/ Kelurahan	Sebagian Besar Wilayah
		Sebelah Utara	Sebelah Timur	Sebelah Selatan	Sebelah Barat			
1	Bontonompo	Kec. Bajeng	Kab. Takalar	Bontonompo Selatan	Kab. Takalar	30,39	14	Dataran Rendah
2	Bontonompo Selatan	Kec. Bontonompo	Kab. Takalar	Kab. Takalar	Kab. Takalar	29,24	9	Dataran Rendah
3	Bajeng	Kec. Pallangga	Kec. Bontomarannu dan Kab. Takalar	Kec. Bontonompo	Kab. Takalar	60,09	14	Dataran Rendah
4	Bajeng Barat	Kec. Bajeng	Kec. Bajeng	Kec. Bontonompo	Kab. Takalar dan Bajeng Barat	19,04	7	Dataran Rendah
5	Pallangga	Kec. Sombaopu	Kec. Bontomarannu	Kec. Bajeng	Kec. Barombong	48,24	16	Dataran Rendah
6	Barombong	Kota Makassar	Kec. Bajeng dan Pallangga	Kec. Bajeng	Kota Makassar	20,67	7	Dataran Rendah
7	Somba Opu	Kota Makassar	Kec. Bontomarannu	Kec. Pallangga dan Kab. Takalar	Kec. Pallangga dan Kota Makassar	28,09	14	Dataran Rendah
8	Bontomarannu	Kec. Pattalassang	Kec. Parangloe	Kec. Pallangga dan Kab. Takalar	Kec. Sombaopu	562,63	9	Dataran Rendah
9	Pattalassang	Kab. Maros dan	Kec. Parangloe	Kec. Bontomarannu	Kec. Sombaopu dan Kec. Pallangga	84,96	8	Dataran Rendah
10	Parangloe	Kab. Maros	Kec. Tinggimoncong	Kec. Manuju	Kec. Bontomarannu dan Kab. Takalar	221,26	7	Dataran Tinggi
11	Manuju	Kec. Parangloe	Kec. Bungaya	Kec. Bungaya	Kec. Pallangga dan Kab. Takalar	91,9	7	Dataran Tinggi
12	Tinggimoncong	Kab. Maros dan Kec. Tombolo Pao	Kab. Bulukumba dan Kec. Tombolo Pao	Kec. Bontolempangan dan Kab. Bantaeng	Kec. Parangloe dan Kec. Manuju	142,87	7	Dataran Tinggi
13	Tombolo Pao	Kab. Bone	Kab. Sinjai	Kab. Bululumba	Kec. Tinggimoncong	251,82	9	Dataran Tinggi

<sup>2</sup> [www.pengadilan negerisungguminasa.com](http://www.pengadilan negerisungguminasa.com), Diakses tanggal 20 Juli 2012.

14	Parigi	Kec. Tinggimoncong	Kab. Bululumba	Kec. Bungaya	Kec. Parangloe	132,76	5	Dataran Tinggi
15	Bungaya	Kec. Parangloe	Kec. Bontolempangan	Kec. Tompobulu	Kab. Takalar	175,53	7	Dataran Tinggi
16	Bontolempangan	Kec. Parangloe dan Kec. Tinggimoncong	Kec. Tinggimoncong	Kec. Tompobulu	Kec. Bungaya	142,46	8	Dataran Tinggi
17	Tompobulu	Kec. Bontolempangan	Kab. Bantaeng dan Kab. Jeneponto	Kab. Jeneponto	Kab. Jeneponto dan	132,54	8	Dataran Tinggi
18	Biringbulu	Kec. Bungaya	Kec. Tompobulu	Kab. Jeneponto	Kab. Takalar	218,84	11	Dataran Tinggi

#### 4. Daftar Perkara Anak yang Masuk di Pengadilan Negeri Sungguminasa

Dari Tahun 2009-2011

Tabel 3

a. Perkara pidana pencemaran nama baik beserta putusannya pada tahun 2009

No.	No. Perkara	Terdakwa	L/P	Usia	Status Dakwaan	Putusan
1.	24/Pid.B/2009/PNS	Nurcaya Binti Rukka	Perempuan	38 tahun	Pasal 310 ayat (1) KUHP	Penjara 4 bulan dan denda Rp. 1.000,-
2.	305/Pid.B/2009/PNS	Sohrawati Binti Bachtiar, Haerawati Binti Bachtiar	Perempuan	30 tahun dan 28 tahun	Pasal 310 ayat (1) KUHP	Penjara 3 bulan dan denda Rp. 2.000, -

Tabel 4

b. Perkara pidana pencemaran nama baik beserta putusannya pada tahun 2011

No.	No. Perkara	Terdakwa	L/P	Usia	Status Dakwaan	Putusan
1.	124/Pid.B/2011/PNS	Gampo Dg. Ngalle	Laki-laki	62 tahun	Pasal 310 ayat (1) KUHP	Penjara 3 bulan, dan denda Rp. 1.000,-
2.	137/Pid.B/2011/PNS	Amelia Dg. Gaga Binti H. Abdul Jalil	Perempuan	30 tahun	Pasal 310 ayat (1) KUHP	Penjara 3 bulan, dan denda Rp. 1.000,-
3.	198/Pid.B/2011/PNS	Drs. Ach Agus Isnaimi	Laki-laki	45 tahun	Primer: Pasal 310 ayat (1) KUHP. Subsider: Pasal 311 ayat (1) KUHP	Penjara 3 bulan, dan denda Rp. 2.000,-
4.	244/Pid.B/2011/PNS	Juma Dg. Ngunjung Bin Kasumang	Laki-laki	41 tahun	Pasal 310 ayat (1)	Penjara 4 bulan dan denda Rp. 2.000,-

***B. Jenis-Jenis Sanksi Pidana yang Di Jatuhkan Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik yang Melakukan Pembelaan***

Pada dasarnya hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan teori apa yang dijadikan pijakan dalam menjatuhkan pidana.<sup>3</sup> Dalam menjalankan kebebasan dalam menjatuhkan pidana inilah hakim sebagai manusia dapat menggunakan daya tafsirnya untuk menentukan pidana bagi terdakwa, sehingga sangat jelas bahwa dalam pengambilan keputusan atau penjatuhan pidana, hakim dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Hakim di Indonesia harus dapat mengenal, menghayati, meresapi hukum yang hidup dan nilai-nilai yang ada di daerah dimana hakim bertugas. Dalam menerapkan peraturan pidana dalam situasi konkrit, hakim harus mempunyai kebebasan untuk:

1. memilih beratnya pidana yang bergerak dari minimum ke maksimum dalam perumusan delik yang bersangkutan;
2. memilih pidana pokok yang mana patut dijatuhkan apakah pidana mati, penjara, kurungan ataukah pidana denda sesuai berat ringannya perbuatan yang dilakukan;
3. sebenarnya sebelum hakim tiba pada pemilihan pidana, baik itu pada macamnya pidana yang diberikan ataupun berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hakim dapat memilih apakah ia menjatuhkan pidana pokok dan tambahan ataukah pidana yang diberatkan saja.

---

<sup>3</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum dan Hakim Pidana* (Jakarta: Erlangga, 1984), h. 48.

Dalam hal sanksi pidana dan ppidanaan terdapat kebijakan tersendiri yaitu:

1. jenis sanksi dapat berupa pidana pokok atau pidana tambahan;
2. jumlah atau lamanya pidana bervariasi;
3. denda
4. penjara antara 3 bulan sampai 20 tahun dan seumur hidup;
5. terdapat pemberatan pidana;
6. percobaan, perbantuan melakukan tindak pidana dan permufakatan jahat, dipidana dengan melakukan tindak pidana.<sup>4</sup>

Dari beberapa kasus perkara pidana pencemaran nama baik yang disidangkan di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kabupaten Gowa tidak ada kasus pencemaran nama baik yang dijatuhi sanksi pidana bebas. Dari beberapa kasus yang terjadi semuanya dihukum dengan sanksi pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda. Seperti yang diterangkan dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang sanksi pidana pencemaran nama baik.

Dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 195.



penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).<sup>5</sup>

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

1. Unsur kesengajaan

Biasa ditafsirkan dari perbuatan-perbuatan sikap yang dianggap sebagai perwujudan dari pernyataan yang menyerang nama baik dan kehormatan orang lain. Hal yang menarik dari unsur kesengajaan ini adalah tindakan mengirim surat kepada instansi resmi yang isinya menyerang nama baik dan kehormatan orang lain sudah diterima sebagai bukti adanya unsur kesengajaan untuk menghina.

2. Unsur menyerang kehormatan atau nama baik

Tindak pidana penghinaan pada dasarnya merupakan suatu tindakan pernyataan atau sikap yang secara sengaja dilakukan untuk menyerang reputasi atau kehormatan orang lain. Kehormatan itu sendiri terdapat beberapa tafsir tersendiri, apabila kehormatan ditafsirkan sebagai harga atau martabat manusia yang disandarkan kepada tatasusila, maka tidak dapat dilakukan kehormatan seseorang itu tidak dapat dilanggar oleh orang lain, karena di dalam hal itu, orang itu sendirilah yang dapat merendahkan kehormatannya, yaitu apabila pelaku melakukan sesuatu perbuatan yang tidak patut.

---

<sup>5</sup> Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHP, & KUHPdt)* (Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2008), h. 76-77.

### 3. Unsur di muka umum

Istilah di muka umum tidak berarti selalu di tempat umum, tetapi juga dapat meliputi satu rumah kediaman dengan dihadiri dengan banyak orang. Sebaliknya, apakah penghinaan diucapkan di tempat umum, tetap hanya terhadap seorang saja, bukan orang yang dihina dan tidak dimaksudkan agar disampaikan kepada orang itu, maka tidak ada tindak pidana ini.

### ***C. Dasar Pertimbangan dan Upaya Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik yang Melakukan Pembelaan***

Hakim merupakan penegak hukum yang dapat mengadili suatu perkara sesuai dengan *in book* ataupun sesuai hati nurani di luar dari undang-undang yang mengaturnya hingga mencapai tahap akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Hakim sebagai anggota dari badan perkara merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memegang peranan penting di Negara Republik Indonesia, sebagai penegak hukum, hakim memiliki kedudukan yang sangat terhormat dan menentukan suatu perkara yang diberikan kepadanya, karena pada akhirnya hakimlah yang menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara yang diberikan kepadanya.

Dalam melaksanakan fungsi peradilan, para hakim atau pengadilan harus sekaligus menghormati keadilan maupun hak asasi, meskipun batas keseimbangan penghormatan antara kebenaran dan keadilan serta penghargaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dalam menyelesaikan peristiwa pidana sangat sulit ditegaskan. Namun, kesulitan itu jangan sampai menjadi alasan teknis yang sempit

dan kaku dalam memberi kebebasan bagi pelaku tindak pidana agar leluasa berkeliaraan di tengah kehidupan masyarakat.<sup>6</sup>

Hakim mutlak harus memiliki sikap yang teliti dan hati-hati dalam menghadapi setiap kasus tindak pidana yang dilimpahkan kepadanya yang akan diputus agar hakim tidak terjebak dalam kekeliruan atau kesalahan dalam penerapan hukum yang dapat mengakibatkan putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Hakim dalam mengembangkan amanah menegakkan keadilan, harus mampu menyelesaikan persoalan hukum dengan jaminan mendapatkan keadilan bagi pencari keadilan.

Dari wawancara dengan hakim menyatakan bahwa yang merupakan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana pencemaran nama baik adalah:

Menurut Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menurut pendapat Soesilo, hakim yang menentukan termasuk yang kepentingan umum ini misalnya dilakukan demo atau unjuk rasa dengan adanya undang-undang kebebasan berpendapat yang menyatakan kebebasan berpendapat atau berarti orang bebas menyatakan pendapatnya. Contohnya pejabat si A telah korupsi dan seterusnya. Misalnya, dia mempunyai bukti-bukti tentunya hakim harus hati-hati untuk menentukan bahwa terdakwa benar melakukan penistaan atau tidak. Adanya kebebasan berpendapat atau orang bebas berpendapat asalkan berdasarkan fakta.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, t.th.), h. 27.

<sup>7</sup> Yoga Dwi Ariastomo Nugroho, *Wawancara*, di PN. Sungguminasa, 16 Juli 2012.

Dalam wawancara dengan hakim I menyatakan bahwa yang merupakan upaya hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana pencemaran nama baik adalah:

Upaya yang hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara pencemaran nama baik adalah hakim lebih teliti lagi. Hakim harus menayakan perbuatan seperti apa yang dituduhkan, latar belakang, dan seterusnya. Sehingga jelas apakah menurut Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Harus selektif apabila dengan adanya undang-undang kebebasan berpendapat memberikan pendapat di muka umum, tapi juga bukan sebebas-bebasnya dengan cara santum, sesuai dengan fakta.<sup>8</sup>

Dalam wawancara dengan hakim II menyatakan bahwa:

Dalam perkara pencemaran nama baik yang bertujuan untuk mencapai kebenaran materiil ialah dihadapkannya saksi ahli dengan menilai apakah terdakwa itu benar-benar terdorong demi membela kepentingan umum atau membela diri. Sehingga dalam memeriksa dan memutus perkara pencemaran nama baik yang melakukan pembelaan, kecermatan hakim sangat penting dalam memperoleh putusan yang adil dan bijaksana dan dijunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>9</sup>

Selanjutnya kebijaksanaan yang cermat dari hakim dalam memeriksa tindak pidana pencemaran nama baik dapat dilakukan dalam beberapa hal antara lain:

1. Mengetahui dan menyaksikan sendiri apakah korban merasa dirugikan oleh pelaku atas pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pelaku.

---

<sup>8</sup> Yoga Dwi Ariastomo Nugroho, *Wawancara*, di PN. Sungguminasa, 16 Juli 2012.

<sup>9</sup> Hernawati, SH., *Wawancara*, di PN, Sungguminasa, 16 Juli 2012.

2. Menghadirkan seorang saksi ahli pada persidangan yang dapat memperkirakan bahwa terdakwa ini benar-benar terdorong demi membela kepentingan umum atau membela diri.

Upaya-upaya tersebut dimaksudkan antara lain bertujuan untuk mencapai putusan yang bermaslahat dan menjadi pedoman bagi hakim-hakim selanjutnya dalam menentukan putusan yang lebih baik bagi pelaku pencemaran nama baik yang melakukan pembelaan dengan tidak hanya memberikan efek jera melainkan melihat dari sisi kemanusiaan.

#### ***D. Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik yang Melakukan Pembelaan***

Dalam teori hukum pidana, tujuan pemidanaan adalah untuk pencegahan atau *prevensi* umum (*general preventie*) maupun *prevensi* khusus (*spesiale preventie*). Dalam sejarah literatur hukum pidana, tujuan hukum pidana dan pemidanaan selalu menjadi hal terpenting dalam pembahasan hukum pidana, karena memang hukum pidana adalah hukum sanksi. Menurut ahli penology, sanksi pidana merupakan sanksi yang istimewa, karena kepentingan hukum yang akan dilindungi oleh kaidah-kaidah hukum pidana (*schutznorm*) adalah nyawa, badan (kebebasan), kehormatan, dan harta benda manusia, di samping kepentingan-kepentingan negara. Dalam berbagai mazhab kriminologi, pemidanaan tidak hanya ditinjau dari bidang hukum pidana saja, tetapi lebih menjadi kajian yang lebih mendalam oleh ilmu sosial, karena dampak pemidanaan terhadap terpidana, dan masyarakat dilingkungan terpidana.

Dari wawancara dengan hakim I, menyatakan bahwa kendala yang dihadapi hakim dalam kasus pencemaran nama baik adalah:

Tentunya sikap berterus terang dari terdakwa. Apakah terdakwa ingin berterus terang. Memang faktanya ada sikap berbicara apa adanya.<sup>10</sup>

Kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pencemaran nama baik yang melakukan pembelaan adalah dari segi yuridis hakim berhak memilih undang-undang mana yang akan dipakai, ataupun pasal mana yang akan dipakai secara tegas mengenai sanksi pidana yang dibebankan kepada pelaku pencemaran nama baik apabila melakukan pembelaan.

Dalam hal ini, hakim biasa berasumsi bebas dalam menentukan undang-undang yang dapat dipakai dalam merumuskan tindak pidana pencemaran nama baik. Hakim berasumsi bahwa dengan dipidana sesuai dengan sistem perasyarakatan pelaku pencemaran nama baik dapat menerimanya dan menjadi orang yang lebih baik.

Dalam wawancara dengan hakim II, menyatakan bahwa kendala yang dihadapi hakim dalam kasus pencemaran nama baik adalah:

Hakim sering kesulitan dalam menetapkan apakah tersangka itu benar-benar melakukan pencemaran nama baik demi kepentingan umum atau untuk membela diri. Terlebih lagi ada pihak yang merasa dirugikan karena namanya tersemar.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Yoga Dwi Ariastomo Nugroho, *Wawancara*, di PN. Sungguminasa, 16 Juli 2012.

<sup>11</sup> Hernawati, SH., *Wawancara*, di PN, Sungguminasa, 16 Juli 2012.

### ***E. Hukum Islam Memandang Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik yang Melakukan Pembelaan***

Sanksi pidana dalam bahasa Arab disebut *uqubah*. Lafaz *uqubah* menurut bahasa berasal dari kata '*aqadah*, artinya mengiringnya dan datang di belakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan menghendaki istilah, '*aqaba*, artinya membalas sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Pencemaran nama baik dalam hukum Islam memanglah sulit, karena harus mengkonversikan dalam kata pencemaran nama baik dengan kata-kata arabnya, sedangkan kata yang mengandung pencemaran nama baik berbeda-beda atau banyak reaksinya.

Menurut Abdul Qadir Audah menyatakan, sanksi pidana adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.

Menurut Al-Gazali, penghinaan adalah menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum.

Dalam kitab Tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin membagi tiga model penghinaan, yaitu:

1. *Sukhriyyah* adalah meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.



2. *Lamzu* adalah menjelek-jelekkan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain.
3. *Tanabuz* adalah model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai yahudi kepada orang Islam.

Dalam hukum pidana Islam, hukum kepidanaan atau disebut juga dengan *jarimah* (perbuatan tindak pidana). *Jarimah* terbagi atas:<sup>12</sup>

1. *Jarimah Hudud*

*Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas sanksi pidananya di dalam al-qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. sanksinya berupa sanksi *had* (keterangan yang terdapat dalam al-qur'an dan sunnah). Sanksi pidananya berupa rajam, dera, potong tangan, penjara atau kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan atau deportasi, dan salib.

2. *Jarimah Ta'zir*

*Jarimah ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman sanksi pidananya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya. Dalam pengertian istilah hukum Islam merupakan sanksi pidana yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *had*. Sanksi pidananya berupa pidana penjara, *skorsing* atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran

---

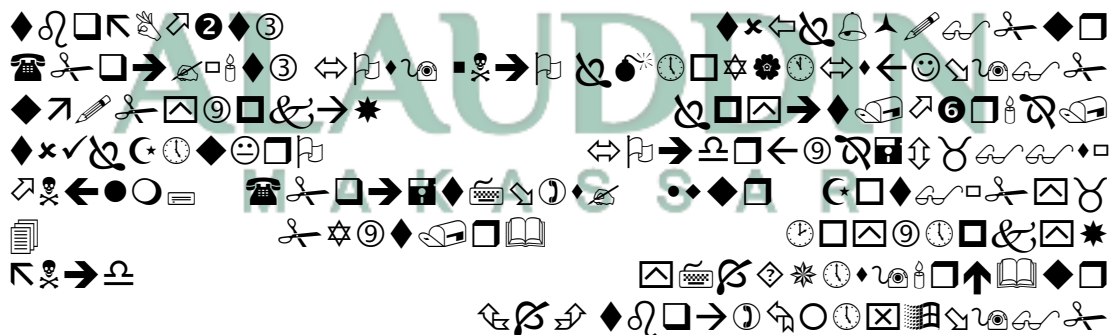
<sup>12</sup> Teguh Prasetyo, *op.cit.*, h. 13.



dengan kata-kata, dan jenis sanksi pidana lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Dalam hukum Islam, aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya *hudud* seperti *jarimah qadzaf*, maupun yang bersifat *ta'zir*, seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain, dan lain-lain. Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada al-qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu.

Dalam hukum Islam sebagai *rahmatan lil alamin*, pada prinsipnya telah menjaga dan menjamin akan kehormatan setiap manusia juga mengharuskan untuk menjaga kehormatan saudara-saudaranya, seperti memberi sanksi kepada seseorang yang menuduh orang lain melakukan zina tanpa dapat menunjukkan bukti yang ditentukan dalam hukum Islam. Sebagaimana firman Allah swt. QS al-Nur (24): 4, yang berbunyi:

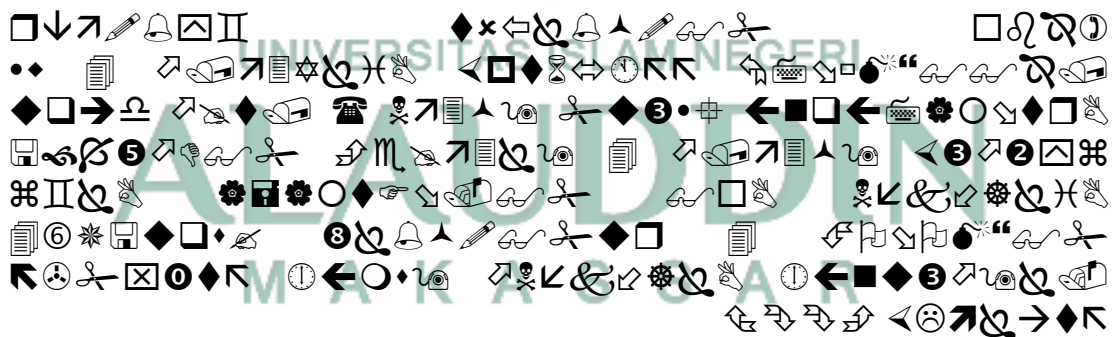


Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik<sup>13</sup> (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.<sup>14</sup>

Kenyataan ini berdasarkan masih banyak kasus-kasus dan pengaduan terkait tindak pidana pencemaran nama baik dan kehormatan yang disertai bukti-bukti yang menunjukkan akan tindak kejahatan ini. Di antara bentuk tindakan pencemaran nama baik adalah menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud supaya orang yang dituduh itu tercemar nama baiknya.

Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik dan sanksinya dalam pandangan Islam *diciyaskan* dengan kejahatan berbagai macam tindak pidana, bisa dihukum dengan pidana *qazaf* (menuduh berzina) dan berita bohong. Sesuai dengan QS al-Nur (24): 11



<sup>13</sup> Yang dimaksud wanita-wanita yang baik-baik di sini ialah wanita-wanita yang suci, akil balig, dan muslimah.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya* (Jakarta: t.p., 1984), h. 543-544.

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.<sup>15</sup>

Dengan demikian kepastian hukum dalam hukum Islam terhadap perilaku tindak pidana pencemaran nama baik dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati dan sanksi moral yaitu tidak diterima kesaksiannya seumur hidup serta tetap dengan mengedepankan asas-asas hukum dan keadilan yang beradab.

Hukum Islam selain menetapkan pidana *hudud* bagi pelaku *qadzaf*, juga menetapkan pidana duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa pidana *ta'zir* yang pelaksanaan sanksi pidananya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif. Selain menetapkan sanksi pidana seperti di atas, Islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik dengan ancaman neraka di akhirat kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seseorang hambanya.

---

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 544-545.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Sanksi pidana pencemaran nama baik yang melakukan pembelaan terdapat dalam Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pencemaran nama baik merupakan delik aduan artinya kasus ini dapat diselidiki atau dilakukan penyelidikan kalau ada pengaduan dari korban atau orang yang merasa tercemar nama baiknya.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan perkara pencemaran nama baik yang melakukan pembelaan adalah hakim harus hati-hati dan penyidik juga harus berhati-hati untuk menentukan bahwa terdakwa benar melakukan pencemaran nama baik atau tidak. Seharusnya hakim menjadikan HAM sebagai dasar pertimbangannya dalam menangani perkara tindak pidana pencemaran nama baik.
3. Dalam hukum Islam, pada prinsipnya telah menjaga dan menjamin akan kehormatan setiap manusia juga mengharuskan untuk menjaga kehormatan saudara-saudaranya. Dalam hukum Islam, penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik dan sanksinya *diiyaskan* dengan kejahatan berbagai macam tindak pidana, bisa dihukum dengan hukuman *hudud* dan hukuman *ta'zir*.

### ***B. Saran***

1. Hakim harus lebih teliti dalam menyikapi kasus pencemaran nama baik. Sehingga jelas apakah menurut Pasal 310 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini benar pelaku melakukan menista dengan tulisan untuk kepentingan umum atau membela diri.
2. Hakim harus lebih selektif dalam memutuskan perkara pencemaran nama baik, apalagi dengan adanya undang-undang kebebasan yang memberikan seseorang berpendapat di muka umum.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno. *Hukum dan Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga, 1984.
- Al-Wisnubroto. *Hakim dan Peradilan Di Indonesia*, Yogyakarta: Atmajaya, 1997.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- . *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an & Terjemahnya*. Jakarta: t.p., 1984.
- Esterbeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, t.th.
- Hiarej, Edly OS. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Pena, 2002.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- . *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Jonkers, J. E. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, Cet I; Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.
- . *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Marwan M. & Jimmy P. *Kamus Hukum: dictionary of Law Complete Edition*, Cet I; Surabaya: Reality apublisher, 2009.



- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yado. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata: Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: IKAHI, 2008.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Nawawi, Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Cet. III; Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Praktik Kedokteran*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pres*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Saleh, Ismail. *Pembinaan Hakim*, Jakarta: Internusa, 1989.
- Santoso, Indra. *Kamus Praktik Bahasa Indonesia*. Surabaya: Pustaka Dua, t.th.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III; Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitidjo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Data Media, 1994.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeria, 1996.
- Solahuddin. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHP, & KUHPdt)*, Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2008.
- Subekti dan Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum Pidana*. Jakarta: Paramita, 1980.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.



Sudikno. *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 2006.

Sugandhi,R. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1981.

Tebba, Sudirman. *Hukum Media Massa*, Cet. I; Banteng: Pustaka Irvan, 2007.

Utrecht, *Rangkai Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tirta Mas, 1987.

[www.google.com](http://www.google.com)

[www.hukumoline.com](http://www.hukumoline.com)

[www.pengadilannegerisungguminasa.com](http://www.pengadilannegerisungguminasa.com)





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**ERNI** lahir di Sungguminasa, Gowa, 01 Januari 1990. Anak ketiga dari empat bersaudara. Lahir dari pasangan **Muh. Arsyad** dan **Rohani**. Tahun 2002 tamat dan mendapat ijazah dari SD Neg. I Sungguminasa. Tahun 2005 tamat dan mendapat ijazah dari SMP Neg. 4 Sungguminasa. Tahun 2008 tamat dan mendapat ijazah dari SMA YAPIP Makassar. Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar angkatan 2008.

